



# KUMPULAN **SAMBUTAN** MENTERI PANRB JULI - AGUSTUS 2019

DISUSUN OLEH: SEKRETARIAT KEMENTERIAN PANRB





## **KATA PENGANTAR**

Naskah sambutan, *keynote speech*, dan orasi ilmiah Menteri PANRB bukan sekedar lembaran-lembaran naskah yang bersifat administratif. Naskah-naskah tersebut merupakan wujud “kebijakan yang berbicara”, yang disampaikan secara langsung oleh Menteri PANRB selaku pimpinan organisasi.

Tidak hanya sebagai media penyampaian kebijakan, materi yang disampaikan oleh Menteri PANRB juga digunakan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik dalam hal informasi capaian kinerja dan inovasi yang telah dilakukan Kementerian PANRB. Oleh karena itu, sebagai pejabat yang berwenang di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, kehadiran Menteri PANRB dan materi yang disampaikannya menjadi hal yang ditunggu-tunggu dan menjadi perhatian banyak pihak.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Sekretariat Kementerian PANRB menyusun buku yang berjudul “**SAMBUTAN MENTERI PANRB JULI-AGUSTUS 2019**”, yang merupakan kompilasi naskah sambutan, *keynote speech*, dan orasi ilmiah Menteri PANRB periode bulan Juli hingga Agustus ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan oleh Menteri PANRB dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, tidak hanya para peserta yang menghadiri acara pada saat Menteri PANRB menyampaikan materinya.

Kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga buku ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak.

Jakarta, September 2019

**Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A.**

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi





## **DAFTAR ISI**

### **Kata Pengantar**

### **Daftar Isi**

### **Sambutan Menteri PANRB**

#### **JULI 2019**

1. *Talking Pointers* “Solusi Penyelesaian Tenaga K2 Guna Mendukung Profesionalitas di Daerah”, Semarang, 3 Juli 2019..... 1
2. Sambutan Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, Semarang, 18 Juli 2019..... 5
3. Sambutan Penutupan PKN Tingkat I Angkatan XLI, Jakarta, 18 Juli 2019 ..... 8
4. Laporan Kepada Wakil Presiden RI pada Kegiatan Presidential Lecture, Jakarta, 24 Juli 2019..... 11
5. Sambutan pada Rapat Koordinasi Pengadaan ASN Tahun 2019 dan Perencanaan ASN Tahun 2020 – 2024, Jakarta, 30 Juli 2019..... 14

#### **AGUSTUS 2019**

6. *Keynote Speech* Membangun Birokrasi yang Bersih Melalui Sinergitas Perguruan Tinggi, Makassar, 6 Agustus 2019..... 17
7. *Talking Pointers* Sosialisasi Pidato Kenegaraan Presiden “SDM Unggul Indonesia Maju”, Jakarta, 14 Agustus 2019..... 23
8. *Launching Program Double Degree* Pengembangan Kapasitas ASN, Jakarta, 21 Agustus 2019..... 27
9. *Talking Pointers Launching* Mobil SKCK Keliling, Jakarta, 21 Agustus 2019 31
10. Pengembangan Kapasitas ASN dalam Mendorong Reformasi Birokrasi, Jakarta, 21 Agustus 2019 ..... 33
11. *Keynote Speech* HUT BPPT ke-41 tentang Pembangunan SDM IPTEK dalam Mewujudkan Visi Indonesia 2020-2024, Jakarta, 22 Agustus 2019.... 36
12. Sambutan Peresmian MPP Bogor, Bogor, 26 Agustus 2019..... 40
13. *Talking Pointers Talkshow* Indonesia Maju-ARSADA, Jakarta, 27 Agustus 2019..... 42
14. Sambutan *Launching* Sistem Informasi Krisna 3.0, Jakarta, 29 Agustus 2019 46



JULI 2019







**TALKING POINTERS**  
**“SOLUSI PENYELESAIAN TENAGA K2**  
**GUNA MENDUKUNG PROFESIONALITAS DI DAERAH”**  
**Semarang, 3 Juli 2019**

***Assalamualaikum Wr. Wb.,***  
***Salam Sejahtera untuk Kita Sekalian.***

**Yang saya hormati:**

- Menteri Dalam Negeri;
- Sekjen Kementerian Keuangan;
- Gubernur Jawa Tengah;
- Ketua dan para Pengurus APEKSI;
- Wali Kota, Sekda, Kepala Bappeda, Asisten Daerah se-Indonesia; serta
- Hadirin yang Berbahagia.

***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Saya baru kembali dari Baku–Azerbaijan untuk menerima langsung penghargaan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam ajang *United Nations Public Service Awards*, dimana salah satu inovasi pelayanan publik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yaitu *petabencana.id* meraih juara pertama untuk kategori “Tata Kelola Pemerintahan Terintegrasi dan Inklusif”. Indonesia adalah satu-satunya perwakilan negara dari Asia Pasifik, yang meraih juara. Prestasi ini membuktikan bahwa tujuan negara untuk menghadirkan birokrasi yang berkelas dunia guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, telah berjalan pada “rel yang tepat” yang ditandai oleh transformasi kualitas pelayanan publik yang diapresiasi dunia.

“Konstelasi dunia berubah”, maka penting untuk mengubah tata kelola pemerintahan dalam iklim demokrasi, di era globalisasi, seiring hadirnya revolusi industri 4.0. Sejarah mencatat peta politik dan konstelasi global pasca perang dingin berubah dari bipolar menjadi monopolar, dalam sistem dunia yang anarki (dimana berlaku siapa yang kuat menjadi pemenang), maka kemenangan demokrasi telah mengubah *landscape* seluruh negara dunia. Demokrasi menyapu lintas peradaban, menimbulkan gelombang perubahan yang dahsyat, sebagai contoh: Balkanisasi, *Arab Springs*, Reformasi Indonesia 1998. Di alam demokrasi, peran *civil society*, media, legislatif, lembaga internasional, dan supremasi hukum menguat, rakyat memegang kendali utuh. Sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat dinilai dari kepuasan publik atas penyelenggaraan tata kelola negara yang semakin akuntabel, transparan, efektif, efisien, serta adaptif mengelola aspek-aspek perubahan (termasuk teknologi), untuk menjawab harapan masyarakat.



***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Seluruh kinerja kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditujukan untuk meraih *public trust*, karena ini yang akan menambah kepercayaan diri kita untuk menyelenggarakan program prioritas pemerintahan secara lebih profesional. Intinya, terletak pada reformasi birokrasi. Sejalan dengan *SDG's*, reformasi birokrasi nasional tidak pernah berhenti mengawal keberlanjutan proses pembangunan. Pada tahun 2019, difokuskan enam kegiatan untuk melanjutkan reformasi birokrasi nasional:

1. Dalam manajemen ASN, menguatkan fondasi sistem merit menuju SMART ASN.
2. Akselerasi *e-government* untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
3. Memantapkan SAKIP guna membangun efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
4. Meluaskan pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan birokrasi bersih melayani.
5. Penataan kelembagaan instansi pemerintah (pusat maupun daerah) agar semakin lincah dan dinamis menjalankan tugas dan fungsinya.
6. Mengoptimalkan pelayanan dasar dan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Hasil survei beberapa lembaga eksternal terkait reformasi birokrasi juga menunjukkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, yakni:

1. Indeks Daya Saing Global melonjak dari peringkat 41 (2016-2017) menjadi 36 (2017-2018).
2. Data World Economic Forum dan World Bank 2018, Global Competitiveness Index 4.0 peringkat Indonesia adalah 45 di tahun 2018 (peringkat 47 di tahun 2017). Artinya, produktivitas sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang meningkat.
3. Skor EODB naik dari 66,47 menjadi 67,96 (peringkat 73) di tahun 2018.
4. Indeks Efektivitas Pemerintahan dari tahun 2015 s.d. 2017, naik 19 level dari peringkat 103 ke 84.
5. Indeks Persepsi Korupsi meningkat dari peringkat 96 (skor 37) di tahun 2017 menjadi peringkat 89 (skor 38) di tahun 2018.
6. Kemajuan reformasi birokrasi yang diukur melalui survei penentuan Indeks Persepsi Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi, yang menunjukkan peningkatan persepsi publik terhadap postur pelayanan dan anti korupsi di semua level pemerintahan.

***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Dalam konteks global, konsep pembangunan negara dalam jangka panjang, tidak lagi hanya mengandalkan sumber daya alam, namun sudah bergeser ke arah pembangunan sumber daya manusia. Negara G-7 dan G-20, Swiss, Singapura, UAE bisa maju karena SDM yang berkualitas tinggi. Sebagai contoh, Qatar yang diblokade politik dan ekonominya selama hampir dua tahun oleh koalisi Arab Saudi, tetap tangguh dan kemandirian ekonominya tetap tumbuh, karena 70% lebih SDM penduduknya adalah pekerja migran/eskpatriat profesional (dari Eropa dan Asia) yang menjalankan roda pemerintahan maupun sektor swasta, yang membangun kota, destinasi wisata dunia, arsitektur publik, sistem dan tata kelola pelayanan publik, dll.



Urgensi pentingnya SDM adalah “sumber daya yang selalu terbarukan”. Manajemen ASN menciptakan kualitas SDM ASN berdaya saing tinggi, kreatif, inovatif, pekerja keras, ulet, dan adaptif menghadapi cepatnya perubahan, kunci utama berjalannya roda pemerintahan ke arah kemajuan bangsa. Ada korelasi yang sangat kuat antara kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas kehidupan masyarakat, dan kemajuan suatu bangsa. Artinya, “Peran ASN bukan lagi faktor minor, tetapi faktor dominan dalam membangun bangsa”.

Untuk menciptakan ASN yang profesional dan berdaya saing tinggi, termasuk bagi Pemda, kebijakan manajemen ASN yang ditempuh adalah:

1. Proporsi ASN harus diubah, yakni sekarang cukup besar pada tenaga administratif (masih 38,40%), sedangkan untuk memacu pertumbuhan dan daya saing dibutuhkan perluasan ketersediaan tenaga profesional/ahli pada poros pembangunan.
2. Prinsip “*Zero Growth*”, artinya: “Tidak menambah jumlah, hanya mengganti yang pensiun”.
3. Rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2019 dilanjutkan. Pada tahun 2018 telah direkrut 238.015 CPNS.
4. Pada tahun 2019, total kebutuhan ASN sebanyak 254.173 yang dibagi menjadi 46.425 pusat (23.213 CPNS dan 23.212 PPPK) dan 207.748 Pemda (62.324 CPNS dan 145.424 PPPK).
5. Guna meningkatkan kapasitas organisasi melalui hadirnya pegawai yang profesional, fleksibel, dan *ready for use*, maka dilakukan rekrutmen PPPK. Awal tahun 2019, sebanyak 51.293 peserta lolos *passing grade* tes PPPK, dengan rincian: 34.954 Guru, 1.392 Dosen PTNB, 1.485 Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), 1.792 Tenaga Kesehatan dan 11.670 Penyuluh Pertanian. Rekrutmen PPPK dilanjutkan pada triwulan ketiga untuk menuntaskan tenaga honorer eks K2 (syarat: ada dalam *database* Badan Kepegawaian Negara (BKN), sesuai aturan perundangan, dengan jabatan prioritas guru, tenaga kesehatan, pertanian, peternakan, dan perikanan).
6. Perencanaan formasi *bottom up* (menyesuaikan anggaran daerah, memperhatikan rasio PNS dengan jumlah penduduk dan luas wilayah).
7. Kementerian PANRB mengingatkan semua kepala daerah untuk memberikan porsi usulan kebutuhan kepada penyandang disabilitas.
8. Budaya dan perilaku koruptif harus dikikis habis. Kebijakan tegas untuk memberhentikan ASN yang terpidana korupsi. Prinsip kebijakan ini tidak berlaku surut. Hingga Mei 2019, sudah dilakukan PTDH terhadap 3.257 ASN terpidana korupsi.

### ***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Reformasi birokrasi juga menunjukkan hasil yang positif. Kebijakan Zona Integritas pada tahun 2018 dibangun 205 *pilot project* pengembangan Zona Integritas, yang terdiri dari 200 Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta 5 (lima) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kemudian kinerja individu ASN terikat dalam sistem pemerintahan yang harus akuntabel. Penguatan SAKIP dalam dua tahun terakhir, berhasil memfokuskan 106 triliun rupiah anggaran untuk prioritas pembangunan di pusat dan daerah, serta membangun kemandirian daerah dalam meningkatkan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. SAKIP mendorong: 1) Keselarasan rencana kegiatan dan anggaran untuk prioritas pembangunan; 2) Program yang



tidak relevan diidentifikasi dan diganti dengan program yang berdampak terbesar untuk pembangunan; 3) Meniadakan kegiatan yang tumpang tindih dan pembiayaan berganda; serta 4) *Quality Control* bagi program pemerintah agar tidak disalahgunakan. Selain itu, pemerintah juga melakukan transformasi generasi SMART ASN yang memanfaatkan kekuatan teknologi (konstruktif bukan destruktif).

Globalisasi teknologi telah mengubah pengalaman masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat oleh sektor privat, sehingga kecepatan akses pelayanan itu juga diinginkan dalam setiap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dalam kegiatan Open Government di Korea Selatan, World Government Summit di Dubai, acara UNPSA di Baku, dan kunjungan ke Public Service Hall di Georgia, seluruh negara dunia sudah memacu pemerintahan yang berbasis elektronik.

*E-government system* di Indonesia mendorong integrasi, percepatan tata kelola, serta penghematan anggaran negara yang sangat signifikan. Maka, kemampuan ASN harus dirangsang untuk dapat mengikuti transformasi ini, jangan sampai ketinggalan. Mari berpandangan dalam konteks negara, bahwa sesungguhnya kita semua di ruangan ini ada dalam payung "Aparatur Negara". Konsep: 1) *The devine theory*, 2) *The social contract theory*, 3) *The force theory*, 4) *the natural theory* seluruhnya, diartikulasikan pada "keberadaan *government* sebagai *soul of the state*", pemerintahan pusat maupun daerah adalah jiwanya negara.

***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Dalam konteks liberalisme dan demokratisasi, keberadaan peradaban manusia dan hukum dijamin oleh negara, pemerintah adalah refleksi hadirnya negara untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu bertanggung jawab menghadirkan akses terbaik dan berkeadilan bagi terselenggaranya hak masyarakat. Sehingga, kinerja kita harus terkoneksi dalam suatu wadah perjuangan yang komprehensif bersama dengan sektor privat dan masyarakat, kita tidak boleh berhenti berjuang untuk membangun masa depan peradaban Indonesia yang dicita-citakan. Kita harus tetap optimis untuk menjadi negara maju, tidak boleh pesimis, tidak pula berhenti sekarang, karena perjuangan itu masih panjang, dan akan kita wariskan untuk anak cucu di masa mendatang.

***Sekian dan Terima Kasih  
Wassalammualaikum Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**SAMBUTAN  
PENGHARGAAN TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
Semarang, 18 Juli 2019**

***Assalammua'alaikum Wr. Wb.,  
Salam Sejahtera untuk Kita Sekalian.***

**Yang saya hormati:**

- Gubernur dan para Pejabat Forkopimda Jateng;
- Para Pejabat yang Mewakili Instansi Pusat/Daerah;
- Tim Panel Independen dan Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019;
- Sesmen dan para Deputi Kementerian PANRB;
- Seluruh Hadirin dan Tamu Undangan yang Berbahagia.

Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga kita semua dapat mengikuti penganugerahan Top 99 Pelayanan Publik Tahun 2019, sebagai momentum penting menguatnya “Gerakan Indonesia Melayani” dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda), bahkan hingga ujung terdepan pelayanan masyarakat. Sekarang, atmosfernya bukan lagi memacu untuk mau berinovasi, tetapi sangat bersemangat untuk berlomba-lomba menghadirkan inovasi yang kreatif, inovasi yang melayani masyarakat.

Paradigmanya sudah bergeser, yakni negara hadir untuk menjamin dan memudahkan masyarakat memperoleh hak-haknya melalui terobosan, inovasi, kreasi pelayanan yang semakin baik, menyentuh harapan masyarakat untuk bahagia dan sejahtera. Buktinya, sejak Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik digulirkan tahun 2014, trennya semakin meningkat. Puncaknya, pada tahun 2019 sebanyak 330 K/ L/Pemda melahirkan 3.156 inovasi. Total dari tahun 2014, telah lahir 13.214 inovasi pelayanan publik. Tentu inovasi ini lahir karena meningkatnya kebutuhan masyarakat, karena dinamika perubahan yang sangat cepat di semua aspek kehidupan, sehingga tuntutan masyarakat itu harus dijawab melalui representasi pelayanan publik yang inovatif, adaptif dengan kemajuan teknologi, namun tetap berkarakter kearifan lokal. Oleh karenanya, saya memberi apresiasi penuh kepada seluruh lini pelayanan pemerintah, tidak terbatas pada yang hadir di ruangan ini, tetapi dari seluruh K/L/Pemda, atas kerja keras dan kegigihan melayani rakyat, bahwa seluruh inovasi yang dilahirkan adalah yang terbaik untuk Indonesia lebih baik.

***Para hadirin yang berbahagia,***

Inovasi adalah kata kunci yang utama bagi bangsa pemenang, yang memenangkan persaingan global. Inovasi harus terinternalisasi di seluruh program pemerintah, baik pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, perluasan investasi, reformasi birokrasi,





termasuk mengawal aliran setiap rupiah anggaran agar bermanfaat bagi pertumbuhan dan pembangunan.

Dalam berbagai forum global, Open Government di Korea Selatan, World Government Summit di Dubai, KTT G-20 di Argentina (2018) dan di Osaka Jepang (2019), seluruh negara dunia memacu inovasi terbaru untuk menghadirkan pemerintahan yang semakin adaptif dan fleksibel dengan cepatnya perubahan zaman. Sebagian besar inovasi itu datang dari perkembangan teknologi, termasuk Indonesia, juga diterpa oleh peradaban baru ini. Apalagi generasi *millennial* Indonesia yang proyeksinya bertumbuh sangat signifikan mencapai 63 juta jiwa adalah pemain utama ekonomi Indonesia dalam bonus demografi pada 2030. Jumlah mereka juga akan bertambah terus. Mereka juga yang menjadi tumpuan berjalannya pemerintahan yang berkelas dunia di masa depan.

Di tengah kondisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,9% ke 3,5%, pelemahan ekonomi Tiongkok dari 9% menjadi di bawah 6%, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, *platform* gerakan sosial berbasis *online* kitabisa.com berhasil menggalang dana lebih dari 460 miliar rupiah dalam lima tahun, untuk gempa Palu, rumah sakit apung, gempa Lombok, dan lainnya. Analoginya untuk sektor publik, dalam konteks inovasi pelayanan publik, orientasinya bukan lagi sekedar untuk menjembatani kehadiran program pemerintah, tetapi juga mengakomodir kebutuhan dan kecenderungan karakter, budaya, DNA "*millennial*", yaitu pelayanan yang semakin cepat, mudah, murah, dan aksesibilitasnya tinggi.

Sebagai contoh, dalam ajang United Nation Public Service Awards 2019 di Baku-Azerbaijan, inovasi petabencana.id dari BNPB meraih juara pertama untuk kategori pelayanan pemerintahan yang terintegrasi pada institusi sektor publik. Program ini menyajikan akses informasi bencana secara *real time*, mudah di-*share* dan aman. Masyarakat dapat memberi saran keputusan, bahkan mudah dioperasikan melalui *instant messaging*, *social media*, dan sms. Dalam situasi bencana, semua pihak mendapat informasi akurat, dan dapat mengambil keputusan yang cepat secara luas guna menyelamatkan kemanusiaan.

Kementerian PANRB juga membangun Mal Pelayanan Publik, untuk memudahkan akses perizinan dalam satu titik, dan mendorong seluruh K/L/Pemda ikut berpartisipasi, sehingga *outcome*-nya mendukung peningkatan kemudahan berusaha dan investasi yang menopang pertumbuhan daerah. Jangan lagi ada hitungan hari, namun berubah menjadi hitungan jam. Jangan lagi berbelit, kaku, dan tidak solutif, tetapi buat semakin mudah, efisien, dan efektif.

Tentu masih banyak bahkan ribuan inovasi lain, juga sama pentingnya membantu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, ada tiga strategi fundamental Kementerian PANRB selaku regulator, untuk menjaga siklus pertumbuhan inovasi: 1) Melahirkan/memunculkan inovasi pelayanan publik; 2) Mengembangkan/deseminasi inovasi; 3) Pelembagaan untuk keberlanjutan inovasi.

Melahirkan inovasi melalui "kompetisi" seperti hari ini, perlu ditopang konsistensi dan keberlanjutannya. Oleh karenanya, diberikan Dana Insentif Daerah (DID) untuk pemeliharannya, sekaligus memacu semangat yang lain untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Mengembangkan inovasi melalui metode *transfer knowledge* dan membangun *pilot project* wilayah sebagai suar percontohan bagi daerah lainnya. Sekarang, sudah berdiri tiga Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan



sebagai proyek percontohan. Namun, dalam ajang ini saya sungguh bangga, proporsi inovasi dari Jawa Tengah (Jateng) adalah yang terbanyak. Jateng juga meraih nilai SAKIP yang tertinggi, artinya perluasan sudah terjadi secara positif, berjalan seperti *creeping strategy*, meluas perlahan, saya berharap ini akan menjalar ke seluruh K/L/Pemda. Disamping itu, *transfer knowledge* juga dilakukan *scaling up* bagi inovasi pelayanan publik terpilih, dengan cara glokalisasi program lokal daerah menjadi program nasional, seperti inovasi Sistem EDAT di Teluk Bintuni, sudah menjadi program nasional bidang kesehatan. Strategi pelebagaan inovasi adalah mendorong inovasi menjadi budaya organisasi. Inovasi pelayanan publik dijadikan indikator dan penilaian kinerja individu, programnya harus dipayungi organisasi serta didukung oleh regulasi yang kuat. Walaupun kepemimpinan organisasi berganti, inovasi tetap berjalan, jangan sampai berhenti.

***Para hadirin yang berbahagia,***

Sebagai gambaran, potret produktivitas dan daya saing manusia Indonesia berdasarkan Global Human Capital Index oleh World Economic Forum (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia di peringkat 65 dari 130 negara, masih tertinggal dari Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64).

Indeks Kapasitas Adopsi IPTEK dan penciptaan inovasi Indonesia harus dikuatkan. Tahun 2018, Indonesia peringkat 85 dari 126 negara dengan skor Global Innovation Index (GII) 29,8 atau peringkat 14 dari 15 negara-negara Asia Tenggara dan Oceania. Hal ini dikarenakan infrastruktur Litbang dan jumlah SDM IPTEK terbatas, ekosistem inovasi belum sempurna, pendidikan tinggi belum memadai sebagai sumber inovasi teknologi (*center of excellent*). Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus diinternalisasi optimal. Kita harus menghadirkan model, cara, dan nilai baru dalam mengatasi berbagai masalah kebangsaan, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Mari kita bersiap, membangun birokrasi yang modern, yang siap bersaing dan memenangkan “level global”.

Selamat kepada para nominator penganugerahan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua dalam melanjutkan perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

***Sekian dan Terima Kasih  
Wassalamualaikum Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



## **SAMBUTAN PENUTUPAN PKN TINGKAT I ANGKATAN XLI**

**Jakarta, 18 Juli 2019**

***Assalammua'alaikum Wr. Wb.,  
Salam Sejahtera untuk Kita Sekalian.***

**Yang saya hormati:**

- Kepala LAN, Sestama LAN, serta para Deputi LAN;
- Para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Lintas Kementerian/Lembaga/Daerah;
- Para Widyaiswara;
- Ketua dan Jajaran Pengurus Alumni PKN;
- Para Peserta PKN Tingkat I Angkatan 41, serta Hadirin yang Berbahagia.

Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga semua peserta dapat mengikuti rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan ke-41, hingga di penghujung periode pelatihan ini. Anda semua siap “dilepas ke tengah masyarakat”, melanjutkan karya dan pengabdian untuk bangsa, melalui peningkatan kualitas pada level kepemimpinan, serta pengambilan kebijakan strategis di masing-masing lembaga/institusi. Atas capaian ini, saya ucapkan selamat dan sukses.

***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Pelatihan kepemimpinan nasional LAN adalah program penting dalam membangun kepemimpinan bangsa yang holistik di masa mendatang, karena para lulusan dilatih kapasitasnya dalam mencermati dinamika nasional, kawasan maupun global, melalui bingkai keilmuan, kemudian menjabarkan kebijakan strategis yang konsepnya sinergis lintas kelembagaan. Inilah *prototype* awal bagi terbangunnya pondasi pemerintahan yang dinamis, fleksibel, adaptif, dan responsif “menjembatani” hadirnya solusi untuk setiap permasalahan bangsa, yang penuh dengan ketidakpastian, ambiguitas, dan kompleksitas. Sebagai contoh, proyeksi pertumbuhan ekonomi global turun dari 3,9% ke 3,5%; terjadi pelemahan ekonomi Tiongkok dari 9% menjadi dibawah 6%; terjadi fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme. Dalam lingkup kawasan, KTT G-20 di Osaka Jepang hangat membahas Outlook ASEAN Indo Pasifik, kerja sama terbuka antar-negara di sepanjang Samudera Hindia dan Pasifik. Banyak pemerintahan dunia bertransformasi dan berlomba “merebut dan menarik peluang investasi dunia”, melalui pembangunan destinasi wisata, tata kota, dan sistem pemerintahan modern, kemandirian daerah dipacu membuka lapangan kerja, serta menumbuhkan berbagai inovasi dan kreatifitas yang ditopang penuh oleh teknologi.

Peradaban manusia berubah, terjadi “lompatan besar” di setiap sisi kehidupan. Oleh karenanya, seluruh komponen bangsa harus bergerak untuk perubahan masif. Kementerian, lembaga, badan, Pemda, masyarakat, dan sektor privat, semuanya harus bergerak simultan





mengubah tata kelola birokrasi, hingga menyentuh sendi kehidupan berbangsa yang paling mikro. Kunci pentingnya, terletak pada inovasi, ide, kreatifitas, daya saing, kerja keras, dan produktivitas.

Sebagai gambaran, potret produktivitas dan daya saing manusia Indonesia berdasarkan Global Human Capital Index oleh World Economic Forum (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia diperingkat 65 dari 130 negara, masih tertinggal dari Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64).

Indeks Kapasitas Adopsi IPTEK dan Penciptaan Inovasi Indonesia juga harus dikuatkan, tahun 2018, Indonesia peringkat 85 dari 126 negara dengan skor Global Innovation Index (GII) 29,8 atau peringkat 14 dari 15 negara-negara Asia Tenggara dan Oceania. Hal ini dikarenakan infrastruktur Litbang dan jumlah SDM IPTEK terbatas, ekosistem inovasi belum sempurna, pendidikan tinggi belum memadai sebagai sumber inovasi teknologi (*center of excellent*). Karena itu, reformasi birokrasi harus diinternalisasi optimal melandasi program pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, perluasan investasi, reformasi struktural, dan *mindset*, serta penggunaan APBN agar pemerintahan mampu menghadirkan model, cara, dan nilai baru dalam mengatasi berbagai masalah kebangsaan, mampu menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat. Inilah tugas besar anda, sebagai calon pemimpin bangsa.

***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Saya menyampaikan terima kasih, pelatihan LAN telah menanamkan proyeksi, kajian, *strategic thinking* dan konsep untuk mengembangkan pemerintahan di masa mendatang. Minggu (lalu), saya sangat senang Presiden terpilih menyampaikan visi yang menempatkan reformasi birokrasi sebagai program prioritas. Sesungguhnya reformasi birokrasi telah berjalan baik di Indonesia (menimbang luasnya geografi, demografi, dan sistem pemerintahan yang bertumpu di pusat dan otonomi daerah). Tetapi, perkembangan reformasi birokrasi negara lainnya, juga pesat melampaui Indonesia. Oleh karenanya, besar harapan saya, seluruh lulusan/alumni PKN mampu mengakselerasi reformasi birokrasi di sektoral kelembagaannya, agar Indonesia jangan sampai jauh tertinggal. Fokus kegiatan reformasi birokrasi nasional tahun 2019 ini adalah:

1. Dalam Manajemen ASN, menguatkan fondasi sistem merit menuju SMART ASN, *smart* aparatur (baik PNS, TNI, Polri, PPPK, Pegawai BUMN, dan lainnya).
2. Memantapkan SAKIP guna membangun efektivitas dan efisiensi pemerintahan, mendukung program penggunaan APBN yang fokus, prioritas, dan tepat sasaran untuk pembangunan dan pertumbuhan. Melalui SAKIP: 1) Setiap rupiah anggaran harus fokus memberi manfaat; 2) Rencana kegiatan dan anggaran, prioritas untuk pembangunan; 3) Kegiatan yang tumpang tindih dan pembiayaan berganda dihilangkan; 4) *Quality control* agar program pemerintah tidak menyimpang; 5) Program yang tidak relevan diganti dengan program lain yang berdampak terbesar untuk pembangunan. Dalam tiga tahun terakhir, SAKIP berhasil memfokuskan 498 triliun rupiah anggaran untuk prioritas pembangunan di pusat dan daerah, serta membangun kemandirian daerah dalam meningkatkan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk penguatan SAKIP, Kementerian PANRB juga telah menyusun rekomendasi indikator kinerja utama K/L, sebagai acuan dan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja, sehingga mendorong terbangunnya kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil.



3. Meluaskan pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Birokrasi Bersih Melayani. Unit kerja pelayanan percontohan Zona Integritas (304 WBK dan 23 WBBM) akan diluaskan dimana pada tahun 2018 telah diusulkan 910 unit kerja sebagai *“Islands of Integrity”*, *“Pocket of Effectiveness”*, dan *“Pockets of Efficiency”*.
4. Akselerasi *e-government*/SPBE untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Untuk melihat gambaran kapasitas SPBE, sudah dilakukan evaluasi pada 616 instansi daerah dan 82 instansi pusat. Kita memacu percepatan integrasi, targetnya akhir tahun 2020 SPBE rampung dan diimplementasikan secara nasional.
5. Penataan kelembagaan instansi pemerintah (pusat maupun daerah) agar semakin lincah dan dinamis menjalankan tugas dan fungsinya. Kendala utama organisasi adalah regulasi yang kaku dan struktur yang tidak fleksibel. Model dan pola ini harus diubah dengan mendorong lahirnya ide-ide baru (*new ideas*), inovasi yang kreatif (*creative innovation*), pandangan segar (*fresh perception*), peningkatan berkelanjutan (*continual upgrading*), tindakan dan kebijakan yang cepat dan tepat (*quick action*), sehingga pemerintahan cepat beradaptasi dan fleksibel memberikan solusi bagi masyarakat (*flexible adaptations*). Kementerian PANRB sudah menyusun *Roadmap* Penataan Kelembagaan Pemerintah 2020-2024, serta regulasi tentang hubungan fungsional kementerian dan LPNK. Selanjutnya, 23 lembaga telah dilebur, termasuk audit kelembagaan 21 instansi pusat, dan penataan kelembagaan 179 instansi pusat dari 217 usulan pengajuan, sisanya masih berproses. Kedepan, kebijakan perampingan kelembagaan masih berlanjut untuk yang tidak bermanfaat dan bermasalah.
6. Mengoptimalkan pelayanan dasar dan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha, untuk membuka hambatan investasi. Setiap instansi didorong untuk masuk dalam Mal Pelayanan Publik, yang memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat, filantropi, maupun sektor privat.

***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Mari kita bersiap, membangun birokrasi yang modern, yang siap bersaing dan memenangkan “level global”. “Seluruh ilmu pelatihan adalah bekal, tetapi tugas besar kita adalah membekali seluruh generasi bangsa untuk menjadi pemimpin yang handal membawa pemerintahan indonesia berkelas dunia, berdaya saing unggul dalam kompetisi global.

***Sekian dan Terima Kasih  
Wassalammualaikum Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**LAPORAN KEPADA WAKIL PRESIDEN RI  
PADA KEGIATAN PRESIDENTIAL LECTURE  
Jakarta, 24 Juli 2019**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.,  
Salam Sejahtera bagi Kita Sekalian.***

**Yang saya hormati:**

- Bapak Wakil Presiden RI;
- Para Menteri Kabinet Kerja;
- Duta-Duta Besar Negara Sahabat;
- Former Minister of Personnel Management Republic of Korea, Prof. Pan Suk Kim;
- Para Inspiring Speakers, para CPNS, serta Hadirin dan Undangan yang Berbahagia;

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya pada kegiatan *Presidential Lecture* 2019, dengan tema "Sinergi untuk Melayani: Transformasi Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024", sekaligus kebahagiaan dan momentum yang sangat fundamental bagi aparatur negara, untuk menerima arahan langsung dari Bapak Wakil Presiden, tidak hanya bagi 6.200 CPNS yang hadir di Istora Senayan, namun seluruh CPNS tahun 2018 yang tersebar di seluruh Indonesia juga mengikuti kegiatan ini melalui siaran langsung TVRI.

***Bapak Wakil Presiden RI yang saya hormati,***

*Presidential Lecture* tahun 2019 adalah yang kedua kalinya diselenggarakan untuk menjembatani sekaligus menginternalisasi Visi Presiden terkait arah perjalanan birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan program-program prioritas untuk pertumbuhan dan pembangunan. Melalui kegiatan ini, karakter dan cara pandang dalam bekerja para CPNS, dimutakhirkan secara masif dalam frekuensi yang utuh, karena arahan dari Bapak Wakil Presiden akan langsung diterima oleh para CPNS dan PNS, sebagai "mesin utama" penggerak birokrasi dan "tulang punggung" bangsa dalam menghadapi dinamika kebangsaan yang multidimensional.

Sejalan dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia serta *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional, kami menyiapkan generasi SMART ASN guna mengantisipasi tantangan disrupsi era Revolusi Industri 4.0 serta menjadikan tantangan dan hambatan sebagai kekuatan dan peluang untuk mendorong Visi Indonesia 2045, dengan berfondasi pada transformasi digitalisasi birokrasi yang lebih memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat; memangkas segala bentuk praktik birokrasi yang berbelit dan lamban; memacu kinerja birokrasi menjadi lebih efisien, fleksibel dan adaptif; serta meluaskan semangat perubahan kerja yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi.



Indikator kesiapan Indonesia menunjukkan tren positif. Global Competitiveness Index 4.0 tahun 2018, Indonesia peringkat ke 45 dari 140, naik dua tingkat dari tahun 2017. Government Effectiveness Index Indonesia naik dari tahun 2015-2017 → 46, 53, dan 55, serta tren kenaikan dalam 2 (dua) dekade terakhir (1997-2017), sejak bergulirnya era reformasi.

Dalam rekrutmen tahun 2018, ditetapkan 238.015 formasi pada 76 K/L dan 525 Pemda. Sebanyak 180.624 CPNS lulus dan mengisi 164.783 formasi umum, 6.307 formasi *cumlaude*, 1.808 disabilitas, 604 putra/i Papua dan Papua Barat, 23 diaspora, 287 olahragawan berprestasi internasional, serta 6.812 eks tenaga honorer K2.

Pada kesempatan ini, kami akan memberikan penghargaan kepada peserta seleksi CPNS tahun 2018 golongan III:

1. Peserta dengan nilai SKD tertinggi atas nama Siti Riza Azmiyati dengan skor 444 dari instansi BKKBN;
2. Peserta termuda atas nama Arya Bagus Kevin Rajendra, kelahiran tahun 2000 dari instansi Kementerian PUPR.

Proporsi ASN, total PNS berjumlah 4.287.526 orang, proporsi terbesar adalah tenaga administratif sebesar 1,6 juta (39%). Maka, perlu restrukturisasi agar ASN didominasi jabatan fungsional teknis dan berkeahlian profesional yang lebih optimal mendukung pembangunan baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, berakhirnya RPJMN III, sebagai transisi dari sistem merit menuju birokrasi berkelas dunia, serta memasuki tahun pembangunan SDM 2020 adalah momentum kuat untuk memacu kecepatan bangsa dalam pembentukan generasi SMART ASN yang profesional, berdaya saing, berintegritas, berjiwa kebangsaan, berwawasan global, berkemampuan bahasa asing, IT, membangun *networking*, dan *entrepreneurship*. SMART ASN juga akan menjadi *digital talent* dan *digital leader* seluruh lini terdepan pelayanan pemerintahan.

### ***Bapak Wakil Presiden RI yang saya hormati,***

Kebijakan strategis pembangunan SDM ASN bertumpu pada reformasi manajemen ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK: 1) Perencanaan ASN searah pembangunan nasional dan potensi daerah; 2) Rekrutmen dan seleksi berbasis komputer dan *online*; 3) Pengembangan kompetensi melalui pendekatan pembelajaran ASN *Corporate University*; 4) Penilaian dan penghargaan (*reward*) kinerja; 5) Sistem merit dalam promosi, mutasi dan rotasi; 6) Peningkatan kesejahteraan melalui reformasi sistem gaji, tunjangan, fasilitas, sistem jaminan pensiun dan hari tua.

Selanjutnya Indonesia menduduki peringkat ke-77 dari 119 negara dalam Global Talent Competitiveness Index. Untuk perbaikan indeks ini, struktur ideal ASN perlu didukung Manajemen Talenta Nasional yang dikembangkan untuk menempatkan talenta terbaik pada jabatan strategis. Manajemen talenta institusional dari seluruh instansi diintegrasikan guna membentuk *talent pool* nasional, lalu diselaraskan dengan manajemen talenta korporasi, sehingga memungkinkan mobilisasi talenta lintas sektor, baik publik maupun privat, yang fokus dan prioritas mengungkit pembangunan pusat maupun daerah.



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Untuk regenerasi level kepemimpinan, kami menyiapkan sistem promosi dan rotasi nasional, lintas sektoral, khususnya jabatan pimpinan tinggi, serta penyetaraan pada penghasilan dan fasilitas yang adil dan proporsional, sehingga juga menjadi agen perekat nasional.

***Bapak Wakil Presiden RI yang saya hormati,***

Kegiatan ini merupakan bagian dari Pelatihan Dasar CPNS, sehingga untuk memperkaya wawasan mereka, kami hadirkan tiga tokoh inspiratif:

1. Menteri PPN/Bappenas, Prof. Bambang Brodjonegoro;
2. Prof. Pan Suk Kim, Former Minister of Personnel Management and Professor of Public Administration, Yonsei University, Korea; serta
3. Bapak Wishnutama, Komisaris Utama Net TV, *Creative Director Opening and Closing Ceremonies of Asian Games 2018*.

Kami juga mengundang para gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah yang diharapkan dapat memformulasikan penjabaran kebijakan strategis daerah yang sejalan dengan arahan Bapak Wakil Presiden di tingkat nasional, sehingga program prioritas pemerintah dapat berjalan secara lebih masif dan simultan.

Selanjutnya, dimohon berkenan Bapak Wakil Presiden untuk memberikan arahan strategis pembangunan nasional dan motivasi, serta setelahnya berkenan untuk harmonisasi perkusi bersama 7.143 peserta (CPNS dan hadirin undangan) sebagai simbol sinergi persatuan bangsa untuk melayani negeri.

***Sekian dan Terima Kasih  
Wassalammualaikum Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**





**SAMBUTAN PADA RAPAT KOORDINASI PENGADAAN ASN TAHUN 2019  
DAN PERENCANAAN ASN TAHUN 2020 – 2024  
Jakarta, 30 Juli 2019**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.,  
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua.***

**Yang saya hormati:**

- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala BKN dan Kepala BPKP;
- Para Gubernur, Wali Kota, Bupati;
- Para Pejabat Kementerian PANRB, BKN, BPKP, Pemda, Serta Hadirin yang Berbahagia.

Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Koordinasi Pengadaan ASN Tahun 2019 dan Perencanaan ASN Tahun 2020-2024, sebagai tahapan penting untuk memformulasikan/mengkonsolidasikan strategi nasional pada bidang manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, dalam rangka mewujudkan postur birokrasi berkelas dunia tahun 2024 sesuai fokus pemerintahan yang tertuang dalam RPJMN ke-IV (2020-2024).

***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Seluruh organisasi baik pemerintahan maupun swasta, yang besar maupun kecil, dalam skala makro maupun mikro, bahkan yang melingkupi aspek nasional, regional, maupun global sekalipun (sekarang, sedang beradu cepat) mengembangkan SDM sebagai aset utama organisasinya serta mengadaptasikannya dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, secara *general*, konsep pengembangan ASN, menjadi kunci utama perbaikan birokrasi pemerintahan yang semakin menjawab dinamika, tantangan, harapan, maupun tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karenanya, saya, Menteri PANRB, dan seluruh elemen pemerintahan sangat berbahagia serta tentu harus antusias menyambut visi pemerintahan di masa depan, yang mengorbitkan pembangunan SDM sebagai program prioritas di tahun 2019.

Program tersebut merefleksikan muruah kehadiran negara “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, yang secara menyeluruh juga meliputi aspek peningkatan kualitas tenaga guru, penguatan sistem pendidikan yang menyentuh langsung lapangan pekerjaan, penguatan kapasitas SMART ASN dalam melaksanakan program pemerintahan, termasuk mengembangkan talenta nasional yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, berjiwa melayani, punya jaringan luas, rasa nasionalisme dan integritas, sebagai ladang utama rekrutmen aparatur negara.





Dalam acara UNPSA di Baku–Azerbaijan, saya diundang sebagai pembicara bersama dengan beberapa Menteri dari negara lainnya. Saya cukup terkejut saat beberapa Menteri sangat ambisus, pemerintah UAE punya Menteri *Artificial Intelligence* yang mengembangkan pemerintahan bukan lagi dijalankan oleh manusia tetapi oleh kecerdasan buatan, yang dalam istilah teknologi melampaui kecerdasan manusia sebagai *homo sapiens*. Mereka membangun proyek wisata manusia ke planet Mars, melampaui penelitian angkasa yang dilakukan Amerika Serikat dan Uni Soviet dahulu kala.

Saya juga menyimak presentasi Mr. Teymur Sadikhov, Founder of Silicon Valley Technology Consulting Group, The USA, mengulas *artificial intelligence* dan teknologi robotika untuk menjalankan pemerintahan yang semakin adaptif dengan kencangnya laju teknologi.

Bahwa percepatan pembangunan ASN sebagai “mesin utama” penggerak birokrasi dan “tulang punggung” bangsa guna mengantisipasi dinamika kebangsaan yang kompleks dan multidimensional, untuk mengantisipasi tantangan disrupsi era revolusi industri 4.0 serta mendorong Visi Indonesia 2045 yang adalah suatu keniscayaan yang harus segera direalisasikan.

### ***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Saat ini, Indonesia memiliki 4.287.526 ASN (proporsinya masih belum berimbang karena jumlah jabatan administrasi umum sebanyak 1,6 juta masih mendominasi), padahal kebutuhan ASN “harus diproyeksikan dan terakselerasi” pada pemenuhan tenaga di bidang pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, teknis berkeahlian spesifik) guna mendukung pembangunan nasional dan daerah, serta pengembangan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Oleh karenanya, diperlukan restrukturisasi agar ASN didominasi jabatan fungsional teknis dan berkeahlian profesional. Prinsip rekrutmen ASN adalah *zero growth*, tidak lagi merekrut tenaga administrasi umum, hingga proporsi dan persebaran ASN nasional mencapai angka yang berimbang, *equitable* untuk pembangunan. Pengajuan usulan kebutuhan/formasi ASN secara *bottom up* haruslah menyesuaikan *core business* instansi, analisis jabatan dan beban kerja, serta mengacu pada rencana strategis, ketersediaan pegawai, batas usia pensiun, dan kemampuan anggaran.

Perlu saya sampaikan, proyeksi kebutuhan ASN lima tahun mendatang, dalam kurun 2019 - 2023 dengan perkiraan jumlah pensiun mencapai 931.395 orang, maka untuk menopang laju roda pemerintahan yang berdaya saing di level global, perlu dilakukan rekrutmen bertahap untuk generasi smart ASN, yang meliputi rekrutmen tenaga teknis berkeahlian untuk mengisi kekosongan formasi yang ditinggalkan oleh PNS pensiun, serta rekrutmen tenaga pendidikan dan kesehatan (dua jabatan prioritas di bidang pelayanan dasar) dimungkinkan adanya tambahan rekrutmen sesuai kebutuhan.

Sesuai Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2019, dilakukan rekrutmen CPNS dan CPPPK. Kebutuhan ASN nasional tahun 2019 adalah sebanyak 254.173 formasi, dengan rincian:

- 1) Instansi pusat sebanyak 46.425 terdiri dari 23.213 PNS serta 23.212 PPPK;
- 2) Instansi daerah sebanyak 207.748 terdiri dari 62.324 PNS serta 145.424 PPPK.

Dalam rangka penajaman dan konsolidasi nasional terkait rencana manajemen ASN tersebut, para kepala daerah dibawah pembinaan langsung dari Menteri Dalam Negeri, diundang



secara khusus untuk berdiskusi dan membahas secara mendalam dan komprehensif. Bukan hanya perihal ketersediaan ruang anggaran, kepala daerah juga harus memberikan solusi terbaik yang menjamin keberlanjutan rekrutmen ASN di daerah. Ini membutuhkan *willingness*, mensyaratkan keinginan yang kuat untuk membangun SMART ASN di daerah, bahkan hingga ke pelosok dan daerah terluar Indonesia. Sebagai contoh, saya mendapatkan laporan bahwa beberapa kepala daerah belum menyampaikan formasi kebutuhan tenaga guru. Bagaimana kita menyiapkan tenaga guru apabila formasinya tidak dipetakan dan tidak diusulkan?

Oleh karenanya, diundang juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai *leading sector* pembinaan guru secara nasional, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan rekrutmen ASN untuk pemenuhan tenaga guru di seluruh pelosok Indonesia. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan itu diformulasikan secara tepat oleh kepala daerah dengan melihat luas wilayah, jumlah penduduk, ketersediaan anggaran, sehingga ada titik temu, dan difinalisasi melalui pengajuan formasi yang tepat, akurat, dan efektif menunjang pembangunan kualitas SDM di daerah.

Ini adalah tugas besar kita bersama, pembangunan SDM khususnya aparatur negara bukan hanya *leading sector* satu, dua, atau tiga kementerian, tetapi tugas kita secara utuh sebagai satu bangsa.

Pada kunjungan saya ke Melbourne, minggu lalu, saya banyak bertemu dengan Diaspora Indonesia yang belajar S1, S2, S3, bahkan beberapa profesor (orang Indonesia) di luar negeri. Satu pernyataan yang tidak terduga, bahwa mereka yakin dengan visi pemerintahan Indonesia membangun SDM, bahwa mereka yakin dengan kapasitas SDM ASN yang berkualitas, maju, kreatif, dan berdaya saing tinggi, pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik. Mereka bahkan ingin ikut andil menjadi aparatur negara untuk menjadikan **Indonesia Maju**. "*Mereka yang di luar saja sangat bersemangat, bagaimana dengan kita di dalam?*"

Semangat kita untuk mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara tidaklah boleh padam. Membangun generasi SMART ASN adalah peluang terbesar yang kita miliki, untuk memanfaatkan peluang dan percepatan yang ditawarkan oleh bonus demografi Indonesia dalam periode waktu yang cukup menjanjikan.

Oleh karenanya, mari kita membangun sinergi bersama, menyatukan langkah, upaya, dan pemikiran di ruangan ini untuk merumuskan kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara, serta memberikan manfaat luas bagi tercapainya kesejahteraan rakyat.

***Sekian dan Terima Kasih  
Wassalamualaikum Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**

# AGUSTUS

## 2019





**KEYNOTE SPEECH  
MEMBANGUN BIROKRASI YANG BERSIH  
MELALUI SINERGITAS PERGURUAN TINGGI  
Makassar, 6 Agustus 2019**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.***

**Yang saya hormati:**

- Ketua, Wakil Ketua, serta para Anggota FDGBI (Forum Dewan Guru Besar Indonesia);
- Gubernur Sulsel beserta Unsur Forkopimda;
- Para Narasumber dari K/L/Universitas;
- Para Civitas Akademika dan Hadirin yang Berbahagia.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, sehingga melalui momentum Kongres dan Seminar FDGBI Ke-2, kita dapat bersilaturahmi bersama lebih dari 300 Guru Besar dari 100 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia, untuk mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: menyinergikan pemikiran, gagasan, program kerja, dan langkah strategis yang menghadirkan solusi bagi permasalahan kebangsaan, baik yang sifatnya lokal, nasional maupun global dalam rangka melanjutkan perjuangan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia.

Atas nama pemerintah, saya mengucapkan selamat atas penetapan Ketua dan Wakil Ketua FDGBI periode 2019-2021, semoga melalui program dan rencana kerja yang telah dirancang dan dirumuskan secara komprehensif, FDGBI semakin kuat berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan publik yang adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk menjawab berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat.

***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Sebagai elemen negara, komponen bangsa, dan bagian dari masyarakat, kita perlu menyambut dengan penuh semangat, visi pemerintahan kedepan yang menitikberatkan lima program prioritas, dua diantaranya pembangunan SDM (termasuk melalui peran universitas dan para guru besar) dan penguatan reformasi birokrasi, yang tentu hubungannya ibarat simbiosis mutualisme yang sangat kuat.

Bahwa di era globalisasi, di tengah percepatan Revolusi Industri 4.0, untuk menjaga eksistensi bangsanya, untuk membangun kesejahteraan rakyatnya, untuk memenangkan persaingan global, maka semua negara dunia berlomba mengubah postur birokrasi pemerintahannya, untuk semakin adaptif, cepat, dan hadir melayani masyarakat (baik lokal, nasional, kawasan, maupun global). Reformasi birokrasi adalah landasan penting yang wajib mengalir "denyut dan nadi kinerja pemerintahan", agar hubungan fundamental negara dan rakyat semakin kokoh, masyarakat semakin percaya dan memberi legitimasi publik, sehingga membuat pemerintah semakin percaya diri menjalankan programnya.



Mencermati dunia yang semakin *borderless* (sehingga masyarakat makin mendambakan pelayanan pemerintahan yang cepat dan tidak terbatas jarak, ruang, dan waktu), ditambah lagi postur birokrasi Indonesia yang sangat besar terbentang struktur pemerintahan pusat dan daerah, geografi kepulauan (yang menjadi kendala percepatan program pembangunan), dan diversitas karakter dan budaya lokal (yang kental di setiap individu aparatur). Maka, pemerintah tidak bisa lagi bekerja sendiri untuk menjalankan program dan kebijakannya.

Kerangka dan dinamisasi kinerja pemerintahan harus ditopang oleh kolaborasi sinergis antara pemerintah dengan masyarakat secara terbuka (*open government*). Masyarakat maupun sektor privat dilibatkan secara aktif untuk bersama dengan pemerintah pusat maupun daerah melakukan identifikasi, mengkaji bahkan melahirkan kebijakan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Transisi ini seperti yang dilakukan pemerintahan Inggris, dibawah Margaret Thatcher, tahun 1979, dengan memfokuskan reformasi pada privatisasi di sektor publik yang mendorong pertumbuhan infrastruktur dan transportasi berbasis efektivitas dan efisiensi untuk memulihkan stabilitas ekonomi. Presiden Amerika, Ronald Reagan, tahun 1981-1989, juga melakukan reformasi melalui konsep *Small Government*, yang dilanjutkan Bill Clinton pada tahun 1993 melalui *Reinventing Government*. Lahir kemudian *New Public Management* yang diterapkan di Eropa, Kanada, Australia, New Zealand, dan Amerika Selatan. Reformasi China dengan menggabungkan reformasi ekonomi dengan reformasi administratif selama 20 tahun telah melahirkan China sebagai raksasa ekonomi seperti sekarang.

Saat mengikuti *Open Government Summit* di Korea Selatan, *World Government Summit* di Dubai, dan *United Nation Public Service Awards* di Baku, saya menyaksikan langsung, bahwa seluruh negara maju di dunia, telah menggagas dan merealisasikan praktik terbaik privatisasi di sektor pemerintahan. Birokrasi tidak boleh menutup diri, namun harus terbuka menggabungkan potensi daerah, memanfaatkan peluang eksternal (baik sektor privat maupun teknologi), menyentuh harapan yang diinginkan publik, serta terkoneksi dalam program pemerintah.

*Open Government* telah mendorong lompatan dan kecepatan perubahan di banyak pemerintahan. Contohnya, Amerika Serikat mengembangkan transportasi yang berbasis *artificial intelligence*. UAE membangun proyek destinasi wisata ke Mars. Jepang mengenalkan *Super Smart Society 5.0* serta mengkoneksikan *artificial intelligence* dengan sistem pemerintahan untuk mengantisipasi reduksi populasi, perubahan iklim dan cuaca, ketidakstabilan energi, pangan, dan air. Arab Saudi membangun Visi 2030 melalui rintisan megaprojek Neom (kota masa depan yang modern dan kosmopolitan di Laut Merah). Tiongkok tidak mau kalah dengan meluncurkan bulan buatan di atas Kota Chengdu, serta membangun koridor iklim yang mengubah Gurun Gobi yang tandus menjadi lahan subur.

Indonesia telah memasukkan agenda dan kerangka pemerintahan yang terbuka itu, searah dengan SDG's 2030 (tujuan pembangunan berkelanjutan). Lalu, dalam UNPSA, Indonesia mampu meraih juara pertama untuk dua tahun berturut-turut, yaitu untuk Inovasi Sistem EDAT dari Kabupaten Teluk Bintuni (2018) dan Inovasi petabencana.id dari BNPB (2019), yang keduanya, merefleksikan kategori pemerintahan yang terintegrasi, pelayanan inklusif, serta melibatkan sektor privat dan masyarakat.

Indonesia juga meluncurkan megaprojek Palapa Ring dan Satelit Nusantara Satu untuk membangun percepatan konektivitas antar daerah, meningkatkan perluasan kreativitas dan inovasi





pemerintahan yang cepat dan kolaboratif dengan swasta. Banyak hal lainnya seperti proyek tol Jawa dan Sumatera, peleburan kelembagaan yang tidak efektif, pembangunan SPBE/*e-Government*, rekrutmen 200 ribu *Smart ASN* di tahun 2018 (yang masih berlanjut tahun 2019), pelibatan para ahli dalam pengembangan SAKIP dan zona integritas untuk memfokuskan anggaran pada prioritas pembangunan. Lalu yang terkini, proyek destinasi wisata super prioritas di empat lokasi penting yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo, juga akan segera dibangun. Seluruhnya ini, tidak bisa dikerjakan sendiri, tetapi melalui kerja sama pemerintah pusat, daerah, serta seluruh *stakeholder* terkait bersama masyarakat.

Seluruh itu, bermuara pada pertumbuhan investasi dan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan SDM yang membuka lapangan kerja, serta terbangunnya pemerintahan (lembaga) yang cepat dan dinamis mendorong peningkatan dalam setiap aspek kehidupan, sebagaimana skema visi pemerintahan Indonesia dalam lima tahun ke depan.

***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Melalui kerangka *Open Government* inilah, pemerintah butuh peran dan keterlibatan universitas sebagai tulang punggung lahirnya berbagai kebijakan publik yang berbasis ilmu pengetahuan, serta “menangkap” dinamisasi harapan publik yang selalu berubah tidak pasti.

Pertama, universitas menjembatani lahirnya komunikasi kebijakan publik melalui survei dan riset yang langsung bersentuhan dengan masyarakat serta langsung memberi solusi untuk masalah sosial.

Kedua, melalui universitas, *transfer of knowlegde* praktik terbaik kebijakan publik selalu beregenerasi hingga menemukan formula yang paling tepat diterapkan di tengah masyarakat sesuai karakter wilayahnya.

Ketiga, universitas adalah barometer pengembangan SDM Indonesia, melahirkan banyak akademisi dan praktisi yang punya latar belakang keahlian, spesialisasi dan kapasitas profesional yang akan berkarya di segala bidang baik pemerintahan maupun swasta. Artinya, universitas adalah “lambung produksi” kebijakan publik yang menentukan masa depan bangsa, melalui persebaran tenaga-tenaga profesional yang siap berkiprah di pasar tenaga kerja/siap untuk menciptakan lapangan kerja yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keempat, melalui FDGBI, peran guru besar universitas swasta maupun negeri sangat strategis menopang kebijakan pemerintahan yang selaras dengan pencapaian visi pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

Mau tidak mau, disadari atau tidak, kita harus memacu peran penting universitas dalam pemerintahan. Amanah besar ini ada di pundak para guru besar yang hadir sebagai perwakilan universitas maupun para guru besar lainnya dimanapun berada (termasuk di luar negeri).

Secara kuantitatif, setiap daerah punya perguruan tinggi. Minat masyarakat untuk belajar juga semakin tinggi. Tercatat ada sebanyak 3.000 perguruan tinggi swasta dan 121 perguruan tinggi negeri. Untuk mendorong reformasi birokrasi nasional, maka secara kualitas, harus di-*upgrade* sesuai standar kebutuhan pasar dan pemerintahan global. Banyak negara maju sudah melakukan ini, contohnya Singapura (National University of Singapore dan Nanyang Technological University), serta Korea Selatan (Seoul National University dan KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology).



Sebagai ilustrasi, sejak tahun 2008, reformasi birokrasi nasional sudah banyak mencatatkan perubahan penting, seperti Global Competitiveness Index 4.0 tahun 2018, Indonesia peringkat ke 45 dari 140, naik dua *grid* dari tahun 2017. Government Effectiveness Index naik tahun 2015, 2016, 2017 dengan skor 46, 53 dan 55. EODB meningkat, dari 66,47 menjadi 67,96 (peringkat 73) pada tahun 2018. Indeks Daya Saing Global melonjak dari peringkat 41 (2016-2017) menjadi 36 (2017-2018).

Tetapi, teori fisika menyebut “dalam kecepatan tentu ada percepatan”, artinya capaian Indonesia juga banyak dilampaui oleh banyak negara lain, yang mengembangkan birokrasinya jauh lebih maju dan modern. Contoh saja negara adidaya AS, Rusia, dan China, lalu G-7 dan G-20, UAE, Arab Saudi, Qatar, Korea Selatan, serta negara dengan luas geografi tertentu seperti Swiss, Singapura, Azerbaijan, Georgia, dll. Mereka mampu memanfaatkan potensi, diubah menjadi kekuatan terbesar pemerintah yang mengungkit hasil dan manfaat seperti ruang investasi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, dll.

*“Maka, tidak ada kata lain, reformasi birokrasi nasional harus dipacu secara lebih progresif dan masif”.*

Dengan melihat Indeks Kapasitas Adopsi IPTEK dan penciptaan inovasi Indonesia tahun 2018, Indonesia peringkat 85 dari 126 negara dengan skor Global Innovation Index (GII) 29,8 atau peringkat 14 dari 15 negara Asia Tenggara dan Oceania. Hal ini karena infrastruktur Litbang dan jumlah SDM IPTEK terbatas, ekosistem inovasi belum sempurna.

*“Maka, pendidikan tinggi perlu dipacu sebagai sumber inovasi teknologi (center of excellent)”.*

### **Bapak dan Ibu yang saya hormati,**

Kami sebagai regulator reformasi birokrasi, juga berkomitmen menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi di Indonesia, yang pada tahun 2019, difokuskan 6 kegiatan:

- 1) Dalam manajemen ASN, menguatkan fondasi sistem merit menuju SMART ASN.
- 2) Akselerasi *e-Government* untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Penataan kelembagaan instansi pemerintah (pusat maupun daerah) agar semakin lincah dan dinamis menjalankan tugas dan fungsinya.
- 4) Memantapkan SAKIP guna membangun efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
- 5) Meluaskan pembangunan zona integritas untuk mewujudkan birokrasi bersih melayani.
- 6) Mengoptimalkan pelayanan dasar dan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.

“Seluruh program tersebut, berkaitan erat dengan peran universitas sebagai tulang punggung keilmuannya”.

Dalam bidang manajemen aparatur, proporsi ASN adalah sebagai berikut: total PNS berjumlah 4.287.526 orang, proporsi terbesar adalah guru, serta 1,5 juta tenaga administratif (38%). Proporsi dengan pendidikan sarjana (S1, S2, S3) hanya 50%. Maka, perlu restrukturisasi agar ASN didominasi jabatan fungsional teknis dan berkeahlian profesional yang lebih optimal mendukung pembangunan baik di pusat maupun daerah. Indonesia kini diperingkat ke-77 dari 119 negara dalam Global Talent Competitiveness Index. Untuk perbaikan indeks ini, struktur ideal ASN perlu didukung manajemen talenta nasional yang dikembangkan untuk menempatkan talenta terbaik



pada jabatan strategis. Manajemen talenta institusional dari seluruh instansi diintegrasikan guna membentuk *talent pool* nasional, lalu di-*match*-kan dengan manajemen talenta korporasi, sehingga memungkinkan mobilisasi talenta lintas sektor, baik publik maupun privat. Mereka ini bisa hadir melalui peran akademisi seperti para guru besar yang lahir dari universitas. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh universitas yang membantu pembuatan materi soal rekutmen CPNS untuk tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Dalam bidang kinerja instansi pemerintah, Kementerian PANRB sangat berterima kasih kepada seluruh universitas yang mendukung kajian dan penyempurnaan SAKIP. Sekarang, SAKIP telah menjadi “khazanah keilmuan baru” tentang praktik terbaik reformasi birokrasi yang muncul di Indonesia, dan sekarang SAKIP menjadi “permata baru” yang dipelajari dan diteliti oleh banyak negara lain. Kementerian PANRB menyelenggarakan simposium internasional tentang SAKIP di Nusa Dua, Bali. Setelahnya, negara ASEAN, Asia Selatan, Asia Timur, dan Pasifik banyak mempelajari SAKIP. Saya punya harapan besar, seluruh universitas dapat mengembangkan SAKIP sebagai studi pembelajaran, untuk perluasan ilmu administrasi. Dipahami bukan hanya oleh para mahasiswa, tetapi oleh seluruh ASN, dan dikembangkan secara masif, hingga daerah terpencil dan daerah terluar oleh seluruh unit kerja pemerintahan terdepan yang melayani masyarakat.

Dalam bidang pelayanan publik, universitas dapat diposisikan sebagai ladang inovasi, kreativitas, dan terobosan bagi lahirnya inovasi kebijakan publik yang melayani masyarakat, mudah, cepat, adaptif dengan kemajuan teknologi, dan tetap berkarakter kearifan daerah. Sejak Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik digulirkan tahun 2014, trennya semakin meningkat. Puncaknya, pada tahun 2019 sebanyak 330 K/L/Pemda melahirkan 3.156 inovasi. Total dari tahun 2014, sudah lahir 13.214 inovasi pelayanan publik. Kementerian PANRB memiliki tim independen, tim *evaluator*, dan tim pendampingan pelayanan publik yang melibatkan para guru besar. Mereka mendampingi siklus pertumbuhan inovasi, dimulai dari 1) Melahirkan/memunculkan inovasi pelayanan publik, 2) Diseminasi inovasi; 3) Pelembagaan untuk keberlanjutan inovasi. Setelah inovasi lahir, dirangking top 99, dirangking lagi top 45, lalu mereka diberi dana insentif daerah, untuk memacu semangat yang lain untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, sudah berdiri 14 Mal Pelayanan Publik, untuk memudahkan akses perizinan dalam satu titik, dan mendorong seluruh K/L/Pemda dan swasta ikut berpartisipasi, sehingga *outcome*-nya peningkatan kemudahan berusaha dan investasi yang menopang pertumbuhan daerah.

Restrukturisasi kelembagaan juga tidak terlepas dari kehadiran ide, gagasan, dan pemikiran yang tajam dari para ahli pemerintahan termasuk para guru besar. Untuk menyusun regulasi yang tepat, melebur lembaga yang tidak produktif, menyelaraskan tumpang tindih aturan, serta merampingkan postur birokrasi yang gemuk.

### ***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Paradigma yang ingin saya reposisi adalah bahwa universitas adalah fondasi terpenting/basis keilmuannya pemerintah, dan peran guru besar menjadi sangat strategis mendorong lahirnya pemerintahan profesional. Tugas kita sebagai generasi bangsa, sangatlah besar. Kita juga masih akan menghadapi banyak fluktuasi dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari bersama membangun birokrasi pemerintahan yang modern, yang siap bersaing dan memenangkan “*level global*”. Dengan bergerak bersama, kita pasti bisa mengkolaborasikan praktik terbaik program pemerintahan di setiap bidangnya.



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Kami sangat terbuka menerima masukan terkait hasil pendidikan, riset, pengkajian dan pengembangan di universitas tentang tata kelola pemerintahan. Kami ingin mendorong kapasitas seluruh universitas di Indonesia sebagai *“world class university”*, yang bersama dengan pemerintah mampu melahirkan berbagai solusi permasalahan bangsa berupa kebijakan publik yang *legitimate* untuk masyarakat.

Semoga perjuangan dan pengabdian kita diridai oleh Allah SWT, untuk melayani negeri menuju Indonesia maju dan rakyat yang sejahtera.

***Sekian dan Terima Kasih  
Wassalammualaikum Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**TALKING POINTERS SOSIALISASI PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN  
“SDM UNGGUL INDONESIA MAJU”  
Jakarta, 14 Agustus 2019**

- Birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan sebuah bangsa dan negara. Pemerintah sejak tahun 2005 terus melakukan upaya perbaikan birokrasi, melalui reformasi birokrasi. Tiga sasaran yang ingin diwujudkan dari upaya reformasi birokrasi, yaitu:
  - 1) **Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**  
Bertujuan untuk mengurangi tingkat penyimpangan, meningkatkan efisiensi dan mengarahkan penggunaan anggaran pembangunan untuk kemanfaatan masyarakat, sehingga penggunaan anggaran pembangunan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Anggaran yang digunakan secara tepat sasaran diharapkan berdampak positif bagi peningkatan kemampuan bersaing dalam masyarakat.
  - 2) **Mewujudkan Pemerintah yang Efektif dan Efisien**  
Bertujuan untuk membangun birokrasi yang berkualitas, dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya, pemanfaatan IT, penyederhanaan organisasi, serta tata kelola pemerintahan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan yang diperlukan untuk mendorong daya saing bangsa dan negara.
  - 3) **Mewujudkan Birokrasi yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas**  
Dengan mendorong inovasi secara terus menerus dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengelolaan pengaduan yang terintegrasi. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dan dunia usaha memperoleh pelayanan yang cepat, murah, pasti, dan nyaman.
- **Capaian utama:**  
Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi, mendorong, dan memberdayakan masyarakat agar masyarakat memiliki kemampuan berkreasi, berinovasi, dan unggul dalam berbagai kegiatan ekonomi. Agar pemerintah dapat mengoptimalkan perannya, maka dilakukan upaya peningkatan kualitas birokrasi melalui :
  - 1) **Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** → untuk mengurangi tingkat penyimpangan, meningkatkan efisiensi dan mengarahkan penggunaan anggaran pembangunan untuk kemanfaatan masyarakat sehingga penggunaan anggaran pembangunan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
    - ➔ Di tingkat pemerintah pusat, dari 84 K/L hanya menyisakan 6 K/L yang masih memiliki kapasitas belum baik.
    - ➔ Di tingkat provinsi, dari 34 provinsi hanya terdapat 5 provinsi yang masih berada pada zona belum baik, sedangkan 1 provinsi berhasil mencapai puncak kemampuannya.
    - ➔ Di tingkat kabupaten/kota, sekitar 47% berada pada zona yang baik.
  - 2) **Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** → berbagai upaya perbaikan terhadap manajemen pemerintahan telah mendorong peningkatan instansi pemerintah yang dipandang memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan reformasi birokrasi.





- ➔ Pada tahun 2015, 90% K/L sudah memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan reformasi birokrasi. Tahun 2016, angka ini naik menjadi 92%, dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 89%.
- ➔ Pada tahun 2015, 38% pemerintah provinsi yang memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan reformasi birokrasi dan naik terus hingga pada tahun 2018 menjadi 60%.
- ➔ Pada tahun 2015, 4% pemerintah kabupaten/kota memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan reformasi birokrasi, naik pada tahun 2018 menjadi 10%.

### 3) **Penataan Kelembagaan**

Kelembagaan pemerintahan sangat dibutuhkan agar pemerintahan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam mendorong daya saing Indonesia. Dalam kaitan ini, pemerintah secara terus menerus melakukan upaya penataan kelembagaannya. adapun capaian yang telah diperoleh antara lain:

- ➔ Penguatan kebijakan penataan kelembagaan, meliputi penyusunan *roadmap* penataan kelembagaan pemerintah 2020 - 2024, penyusunan kebijakan tentang hubungan fungsional kementerian dan LPNK, dan penetapan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 terkait kebijakan tentang penataan kelembagaan lembaga non struktural;
- ➔ Audit/evaluasi kelembagaan terhadap 21 K/L;
- ➔ Penataan kelembagaan instansi pemerintah terhadap 179 K/L dari 217 usulan pengajuan.

### 4) **Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

- ➔ Penguatan kebijakan SPBE melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE;
- ➔ Survei kapasitas SPBE pada 82 instansi pemerintah pusat dan 616 instansi daerah; dan
- ➔ Kerja sama pengembangan *e-government* dengan Korea Selatan sebagai tindak lanjut dari kunjungan presiden RI ke Korea.

### 5) **Penataan Manajemen ASN**

- ➔ Pengadaan CPNS yang Selaras dengan Visi Nawa Cita
  - ➔ Tahun 2017, pemerintah berhasil merekrut 33.155 ASN dari total pelamar sebanyak 2.433.656 orang yang diseleksi melalui Seleksi Kompetensi Dasar berbasis komputer (*Computer Assisted Test*).
  - ➔ Pada tahun 2018, 4,4 juta pelamar yang memiliki akun bersaing memperebutkan 238.000 formasi dan sebanyak 179.576 orang yang berhasil diterima sebagai CPNS.
  - ➔ Secara keseluruhan, sejak tahun 2014, pemerintah telah menerima 317.979 orang PNS.
- ➔ Penempatan CPNS dari sekolah ikatan dinas di daerah yang bukan daerah asalnya ➔ sebagai upaya pemerintah untuk menempatkan ASN sebagai perekat bangsa.
- ➔ Penguatan kebijakan ➔ untuk menjaga agar SDM memiliki kepastian karir, kesejahteraan dan masa depannya. Beberapa kebijakan yang telah dan sedang disusun antara lain : 1) PP 49 / 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); 2) PermenPANRB 38 / 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan; 3) PermenPANRB 40 / 2018 Pedoman Sistem Merit; 4) RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas; 5) RPP tentang Pensiun dan Jaminan Hari Tua.





#### **6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Hasil kerja nyata pemerintah yang sangat terlihat oleh masyarakat adalah penyediaan pelayanan publik yang memenuhi unsur-unsur cepat, murah, tepat, pasti dan bebas dari KKN. Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, pemerintah telah melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain :

- ➔ Pembentukan 15 MPP, yang mengintegrasikan pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
- ➔ Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, yang berhasil mendorong munculnya inovasi - inovasi pelayanan publik di seluruh level pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sejak dimulai pada tahun 2014, peserta kompetisi ini terus meningkat sehingga total dari tahun 2014 s.d. 2019 menghasilkan 13.214 inovasi, yang menunjukkan kecenderungan positif munculnya kreativitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Sejauh ini Indonesia sudah beberapa kali memperoleh penghargaan internasional - *United Nation Public Service Award (UNPSA)*. Beberapa capaian internasional yang berhasil diperoleh, yaitu :
  - ➔ Kabupaten Aceh Singkil dengan inovasi “Kerja Sama Dukun Beranak dengan Bidan Pada Saat Melahirkan untuk Menurunkan Tingkat Kematian Ibu dan Anak” (2015, Juara 2).
  - ➔ Kabupaten Sragen dengan inovasi “UPTPK: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan” (2015, Juara 2).
  - ➔ Kabupaten Teluk Bintuni dengan inovasi “Pengendalian Malaria Melalui Sistem EDAT” (2018, Juara 1).
  - ➔ Provinsi Jawa Timur dengan inovasi “Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera)” (2018, Finalis).
  - ➔ Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Inovasi “petabencana.id” (2019, Finalis). Penghargaan akan disampaikan di Baku, Azerbaijan.

#### **▪ Langkah ke depan :**

##### **➔ Permasalahan dan kendala**

- 1) Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi sangat tergantung pada komitmen pimpinan instansi. Permasalahan yang dihadapi dan sekaligus menjadi kendala adalah tidak banyak pimpinan yang memiliki komitmen kuat secara konsisten mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Kurangnya komitmen pimpinan instansi mengakibatkan munculnya berbagai hambatan dalam upaya memperbaiki inefisiensi dalam pengelolaan anggaran, akuntabilitas kinerja, penerapan SPBE, budaya kinerja dan penerapan pelayanan prima;
- 2) Belum terciptanya sinergitas dan koordinasi lintas K/L dalam pemerintahan untuk mendukung keserasian, kesinambungan, dan keterpaduan pelaksanaan tugas;
- 3) SPBE belum terintegrasi dengan baik -- pusat maupun daerah -- serta masih terdapat kecenderungan setiap instansi mengembangkan aplikasi secara sendiri - sendiri yang mengakibatkan pemborosan.

##### **➔ Langkah-langkah terobosan**

- 1) Mempercepat penerapan SPBE;



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

- 2) Melakukan kolaborasi dengan berbagai Perguruan Tinggi, Pemprov, dan berbagai unsur masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga terciptanya pelayanan publik yang baik;
- 3) Pengembangan *e-learning* untuk mempercepat proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas SDM ASN, terutama dalam penguasaan berbagai pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan upaya mewujudkan Indonesia Unggul;
- 4) Mempercepat penerapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memperoleh tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam upaya membangun Indonesia Unggul.

***Sekian dan Terima Kasih  
Wassalammualaikum Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**LAUNCHING PROGRAM DOUBLE DEGREE  
PENGEMBANGAN KAPASITAS ASN  
Jakarta, 21 Agustus 2019**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.,  
Salam Sejahtera bagi Kita Sekalian,***

**Yang saya hormati:**

- Para Menteri Kabinet Kerja (Menkeu, Menristekdikti, Menteri PPN/Kepala Bappenas), atau yang Mewakili;
- Kepala BPKP, BKN, LAN, ANRI, dan Dirut LPDP;
- Para Duta Besar Negara Sahabat untuk Indonesia;
- Rektor the University of Melbourne, the University of Canberra, dan Victoria University of Wellington;
- Sahabat saya, para Pimpinan NGO dan Foundation Bidang Pendidikan;
- Sesmen, Para Deputi, Staf Ahli, Staf Khusus pada Kementerian PANRB;
- Para Gubernur, Wali Kota dan Bupati, serta
- Hadirin dan Tamu Undangan yang Berbahagia.

Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga kita dapat menghadiri acara *Launching Program Double Degree* guna Pengembangan Kapasitas ASN, sebagai aset utama sekaligus pilar penopang kualitas SDM yang menjalankan tata kelola pemerintahan di masa mendatang, dalam rangka tercapainya berbagai agenda reformasi birokrasi nasional.

***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Sudah 21 tahun, sejak era Reformasi 1998, bangsa Indonesia menjalankan perubahan yang gradual dalam tata kelola pemerintahannya. Lalu, sudah 11 tahun (sejak 2008) agenda reformasi birokrasi dijalankan secara simultan, komprehensif, dan nasional (dari pusat hingga daerah) untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Tahun ini (2019), saya tersimpul pada suatu titik pandang/paradigma, bahwa reformasi birokrasi merupakan syarat utama bangsa untuk mewujudkan visi Indonesia yang maju.

Mengapa demikian? Pertama, dalam konteks global, saat ini semua negara dunia melakukan lompatan besar mengubah tata kelola pemerintahannya untuk adaptif menjawab perubahan dan ketidakpastian. Banyak negara dunia mengubah visi bangsa dan negaranya, untuk menjadi pemenang kompetisi global, dengan cara keluar dari pusaran disrupsi globalisasi dan revolusi industri 4.0. Banyak negara dunia, termasuk Indonesia, melakukan terobosan dan inovasi besar dalam pemerintahan, bukan hanya untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam skala nasional, tetapi masyarakat dunia mempertahankan laju ekonomi, menarik peluang investasi, mengadopsi teknologi untuk memudahkan pelayanan, membangun kota dan wilayah yang menjadi



favorit destinasi dunia, dan lainnya. Semua negara sudah banyak kemajuan, namun sekali lagi Indonesia masih butuh lompatan yang besar, masih diperlukan kerja keras dan perjuangan ekstra untuk mendorong birokrasi yang lebih kuat dan berdaya saing global.

Sejalan dengan itu, kedua (dalam konteks organisasi) seluruh fungsi pemerintahan harus bergerak lincah, gesit, efektif, efisien menerobos celah-celah inovasi perubahan. Setiap organ negara harus akuntabel, transparan, selektif, prioritas dan tidak tumpang tindih mencapai sasarannya, serta menata keterbatasan dan hambatan menjadi peluang dan kekuatan dalam mencapai sasaran pokok pembangunan. Semuanya ini, bertumpu pada satu kekuatan, yaitu sumber daya manusia (baik aparatur negara, pegawai pada sektor privat, maupun masyarakat).

Ketiga (konteks pemerintahan), tahun 2019 merupakan momentum peralihan keberlanjutan program pemerintahan periode lima tahun ke depan. Titik ini, adalah *action* awal bagi *Grand Design* Reformasi Nasional (yang diformulasikan searah dengan proyeksi bonus demografi, Visi Indonesia Emas 2045, serta postur SDG's/tujuan pembangunan berkelanjutan). Syukur alhamdulillah, pada tahun ini pula, visi pemerintahan terpilih, meletakkan reformasi birokrasi sebagai program prioritas, melengkapi program lainnya seperti pembangunan infrastruktur, penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, pemangkasan perizinan berbelit untuk membuka ruang investasi dan lapangan kerja, serta pembangunan kualitas SDM yang unggul.

### ***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Gambaran populasi global menunjukkan bahwa 150 juta penduduk dunia akan kehilangan pekerjaan di tahun 2050, sekitar 450 juta penduduk dunia bergabung dalam pekerjaan baru. Dengan demikian diprediksi harus ada 300 juta lapangan kerja yang disiapkan untuk menampung gap itu selama 30 tahun.

Lalu, lapangan kerja di masa depan, berbeda dari sekarang. Riset Mc Kinsey menyebutkan bahwa 50% pekerjaan terdisrupsi oleh otomatisasi dan 65% pelajar akan bekerja di posisi yang tidak ada sekarang.

Negara “*high income*” memposisikan kekayaan SDM sebagai porsi terbesar dari aset finansial bangsanya. Maka, sangat tepat bagi pemerintah untuk berinvestasi pada pengembangan pendidikan dan riset, yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM untuk kebutuhan sektor publik maupun privat, menciptakan generasi muda yang ekspertise, profesional, spesialis, dan berpola riset dibidangnya.

Sejarah panjang peradaban yang sukses, terukir jika suatu bangsa menempatkan sumber daya manusia sebagai inti peradaban. Generasi muda adalah segmen masyarakat, yang penting bagi pemerintah. Tumpuan kemajuan di Timur Tengah ternyata karena 60% populasinya berusia dibawah 25 tahun, tetapi mereka punya potensi kuat membangun negara.

Indonesia punya bonus demografi, dengan kekuatan 63 juta generasi milenial, (jumlahnya lebih besar), dan ini adalah potensi “tenaga dan darah muda” untuk pembangunan. Oleh karenanya, pemerintah perlu membangun strategi baru, yang menjembatani lulusan lembaga pendidikan untuk memenuhi pasar kerja dan langsung berkarya, termasuk di sektor pemerintahan.

Indonesia kini diperingkat ke-77 dari 119 negara dalam Global Talent Competitiveness Index. untuk perbaikan indeks ini, struktur ideal ASN perlu didukung manajemen talenta nasional yang



dikembangkan untuk menempatkan talenta terbaik pada jabatan strategis. Manajemen talenta institusional dari seluruh instansi diintegrasikan guna membentuk *talent pool* nasional, lalu, di-*match*-kan dengan manajemen talenta korporasi, sehingga memungkinkan mobilisasi talenta lintas sektor, baik publik maupun privat.

Banyak negara maju, yang merekrut lulusan terbaik dari universitas di negaranya untuk menjadi aparatur pemerintah. Maka, seluruh K/L/Pemda harus berlomba menggali dan membina bibit unggul ASN sejak dimulai di lembaga pendidikan. Mereka yang menonjol direkrut dan diberi peluang belajar. Hal ini sudah saya lakukan saat mereformasi SDM Polri. Hasilnya generasi Polri sekarang, tangguh dan semakin menopang citra Polri yang dipercaya masyarakat. Ini adalah program penting dalam rekrutmen ASN ke depan, saya ingin “sistem pembibitan” ini berjalan.

Kedua, membangun pemerintahan berbasis universitas sebagai *backbones* keilmuannya. Artinya, setiap kebijakan publik lahir melalui riset dan kajian di universitas. Ada proses *transfer of knowledge* yang melahirkan *best practice* dalam pemerintahan.

Ketiga, kapasitas ASN juga harus di-*upgrade*. Proporsi ASN dengan total berjumlah 4.287.526 orang, proporsi terbesar adalah guru, serta 1,5 juta tenaga administratif (38%). Proporsi sarjana (S1, S2, S3) hanya 50%. Banyak rutinitas dan pekerjaan administratif akan tergantikan sistem (jika SPBE rampung). Tenaga administrasi perlu direstrukturisasi secara fungsional teknis dan berkeahlian profesional sehingga lebih optimal mendukung pembangunan di pusat maupun daerah. Lalu, mencermati perbandingan kuantitas ASN dan total penduduk, setidaknya dibutuhkan satu juta ASN profesional dalam lima tahun ke depan, untuk mencapai postur ASN yang proporsional dan profesional menopang Visi Indonesia Maju.

Oleh karenanya, salah satu solusi terbaik yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB adalah membangun kerja sama program *double degree* untuk pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang lebih unggul, yang sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Para ASN dari seluruh K/L/Pemda akan diseleksi dan direkrut untuk menjalani pendidikan berbagai bidang studi seperti administrasi pemerintahan, kebijakan publik, *e-government*, reformasi sektor publik, dan lainnya. Sekali lagi, ini pernah saya terapkan saat menjabat Kalemdiklat POLRI, dan berhasil mereformasi SDM di organisasi kepolisian. Tentu, juga didukung oleh kerjasama yang terbuka dengan NGO, yang saya undang hadir pada acara ini, saya ucapkan terima kasih.

Para ASN yang mengikuti program *double degree* disiapkan sebagai *reform agent*, yang paham isu dan masalah internal (*local content*) serta dikolaborasi dengan konsep dan perkembangan paradigma reformasi birokrasi yang berkembang di dunia (*theory and international content*). Sehingga, akan selalu meregenerasi inovasi dan inspirasi sebagai komponen kunci bagi budaya perubahan tata kelola birokrasi yang lebih baik.

### ***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia penting untuk bisa terbuka, mengembangkan kreativitas, inovasi dan kecepatan kita dalam dunia yang *hyperconnected*. Kita sudah menjalankan itu melalui skema *open government*, sudah banyak kemajuan di pusat maupun daerah melalui skema kerja sama pemerintahan, sektor privat dan masyarakat ini.

Termasuk diantaranya bidang pendidikan, kami sungguh mengapresiasi, penyediaan program beasiswa master dan doktoral di dalam dan luar negeri (untuk peningkatan jumlah dosen





S3 menjadi 41.549 di tahun 2018); serta berbagai program beasiswa lainnya yang disiapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, program *double degree* ini juga sama pentingnya dan fundamental bagi pengembangan reformasi birokrasi Indonesia, karena mengakar langsung pada “inti” kualitas SDM aparatur yang menjalankan pemerintahan.

Karena itu, saya mengharapkan dukungan Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menristekdikti, Dirut LPDP, serta seluruh NGO sahabat untuk dapat berpartisipasi dan mendukung program peningkatan kapasitas ASN, melalui mekanisme yang ditetapkan Kementerian PANRB. Mencermati geografis Indonesia yang luas, maka secara berjenjang, kami bangun peluncurnya di Universitas Indonesia dan Universitas Hasanudin (barat dan timur Indonesia). Harapannya, meluas hingga ke universitas lainnya di seluruh Indonesia, serta universitas dari berbagai negara luar, melalui berbagai skema yang masih dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan.

Selanjutnya, saya meminta dukungan pimpinan K/L/Pemda untuk menyiapkan para ASN yang mumpuni mengikuti program ini, jika perlu di awal tahap pertama ini, dapat mengalokasikan dana instansinya untuk memberangkatkan setidaknya empat s.d. lima orang dari masing-masing instansi.

Sore ini, pukul 16.00 WIB, saya akan membawa program ini untuk mendapat restu dan dukungan dari Dewan Penyantun LPDP. Targetnya, semoga dalam waktu dua bulan ke depan, para ASN gelombang pertama dalam program ini sudah dapat berjalan sesuai targetnya, sambil dilakukan berbagai penyempurnaan dan pengembangan program. Semoga Allah SWT, meridai pengabdian membangun birokrasi, menuju Indonesia Maju.

***Sekian dan Terima Kasih  
Wassalamualaikum Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**TALKING POINTERS**  
**LAUNCHING MOBIL SKCK KELILING**  
**Jakarta, 21 Agustus 2019**

**Yang saya hormati:**

- Kapolda, Wakapolda, Para PJU dan Para Kapolres jajaran Polda Metro Jaya;
  - Direktur dan Jajaran Pimpinan Bank Mandiri;
  - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB;
  - Hadirin dan Tamu Undangan yang Berbahagia.
- 
- Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga kita dapat menghadiri acara *Launching Mobil SKCK Keliling*, guna penguatan pelayanan kepolisian pada bidang mendasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
  - Visi Indonesia Maju melalui pembangunan SDM Indonesia yang unggul adalah suatu keniscayaan dan syarat mutlak bagi kinerja pemerintahan yang mampu menopang negara dan bangsa Indonesia dari disrupsi globalisasi dan revolusi industri 4.0.
    - ➔ Dunia bukan lagi berubah, tetapi menjadi area munculnya ketidakpastian, banyak fluktuasi, banyak transisi, banyak lompatan dan kejutan sehingga kita harus siap mengantisipasi berbagai fenomena global yang berdampak pada situasi nasional, harus siap merebut ruang investasi dunia, harus bersaing menguasai teknologi tercanggih, harus sensitif mengatasi risiko makro maupun mikro, membalikkan kelemahan dan ketiadaan menjadi peluang dan keunggulan. Kuncinya, SDM harus punya inovasi, kreativitas dan kecepatan adaptasi, memunculkan strategi baru yang kolaboratif dari pemerintah, sektor privat, masyarakat, dan semua *stakeholder*.
    - ➔ Demikian pula, stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang harus ditopang secara kondusif. Bukan hanya pada tataran konvensional, tetapi juga keamanan data. Pola-pola pelayanan kepolisian harus dipacu untuk makin mutakhir, modern, berbasis teknologi yang memudahkan aksesibilitas serta menyesuaikan kekinian, tetapi tidak meninggalkan marwahnya, “Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat”.
  - Oleh karenanya, saya mengapresiasi *Launching Mobil SKCK*, yang merupakan buah kerja sama solid antara Polda Metro Jaya bersama *stakeholder* terkait, untuk mempercepat dan memudahkan pelayanan untuk masyarakat.
    - ➔ Wujud *open government*, yang memobilisasi layanan SKCK untuk bisa hadir di beberapa titik, lebih mendekat kepada masyarakat.
    - ➔ Bersama Deputi Bidang Pelayanan Publik, saya melihat *public services mall* di Georgia, Baku, dan banyak negara maju (Indonesia punya 14 Mal Pelayanan Publik). Rating tertinggi pelayanan yang memuaskan adalah kecepatannya. Maka, saya berharap mobil SKCK juga dilengkapi dengan peralatan modern, terkoneksi secara *online* dengan data server, pelayanan di mobil sudah *all in*.



- Saran: *big data* pelayanan SKCK harus mulai disiapkan infrastrukturnya untuk dilebur dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian *e-document*, *e-filing*, *e-payment* dan *e-arsip* juga dikoneksikan secara terpadu, sehingga mudah, murah dan terjangkau. → Dampaknya, *volume PNBP SKCK* juga dapat ditingkatkan secara optimal.
- Pelayanan harus dipangkas agar tidak berbelit, berbagai inovasi bisa melahirkan praktik terbaik pelayanan publik. tetapi jangan longgarkan kewaspadaan, kerahasiaan dan keamanan baik personel maupun data.
- Reformasi birokrasi bukan hanya perubahan fundamental (pada aspek kultural, struktural, instrumental dan kapasitas aparatur), tetapi juga membangun sistem yang baik, yang mengakomodasi harapan masyarakat, yang menopang pemerintahan dari perubahan global, yang mendorong kinerja bersama seluruh generasi penerus menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Bukan hanya kerja Kementerian PANRB, bukan hanya kerja POLRI, bukan hanya kerja satu institusi, tetapi semuanya bergerak bersama untuk perubahan.
- Kemarin, saya memberikan penghargaan kepada personel Polda Metro Jaya atas pengungkapan mafia properti dan kejahatan penipuan pengadaan CPNS. Dua kejahatan ini, sangat meresahkan publik dan menimbulkan *anomali* tata kelola pemerintahan, merusak cita-cita pembangunan SDM aparatur yang profesional.
- Saya ingin, contoh pengungkapan yang cepat dan komprehensif itu, juga diterapkan di semua wilayah, sehingga mendorong dan mengawal berjalannya program reformasi birokrasi nasional.

***Sekian dan Terima Kasih  
Wassalammualaikum Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



PENGEMBANGAN KAPASITAS ASN  
DALAM MENDORONG REFORMASI BIROKRASI  
Jakarta, 21 Agustus 2019

***Assalamualaikum Wr. Wb.,  
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua.***

**Yang kami hormati:**

- Menteri Keuangan;
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Luar Negeri;
- Kepala BPKP, BKN, LAN, ANRI;
- Para Duta Besar Negara Sahabat;
- Para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati;
- Para Perwakilan Universitas;
- Perwakilan Lembaga Donor; serta
- Hadirin Undangan yang Berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan *Letter of Intent*, serta *Launching* Program Pengembangan Kapasitas ASN dalam Mendorong Reformasi Birokrasi.

***Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati,***

Konstelasi dan dinamika pada tataran global dan kawasan, dalam kerangka megatrends global, yang identik dengan evolusi, perubahan dan ketidakpastian (seperti: ketersediaan pangan, air bersih dan energi; perubahan iklim; politik global dan ekonomi makro; globalisasi, Revolusi Industri 4.0, transisi demokrasi dan urbanisasi global dalam perlintasan peradaban) telah menciptakan gelombang perubahan dahsyat bagi *landscape* internal suatu negara.

Oleh karenanya, seluruh bangsa di dunia, dimana semua bentuk pemerintahan negara (yang orientasinya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat) harus melakukan proses adaptasi yang strategis dan fundamental pada tata kelola negaranya. Sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang semakin dinamis, profesional, modern, akuntabel, efektif, efisien, serta berkinerja tinggi.

Bagaimanakah cara menghadapi perubahan itu? Secara filosofis saya menemukan jawaban pertanyaan tersebut saat menghadiri *World Government Summit* di Dubai, dari pembicara bernama Simon Sinek, seorang *leadership expert* dari London, Inggris.



Disebutkanlah teori “*the finite and infinite game*” atau “permainan terbatas dan permainan tidak terbatas” untuk menjelaskan bagaimana idealnya upaya yang dilakukan oleh suatu negara (seluruh bangsa) untuk membangun pemerintahan yang sangat kuat dalam mencapai tujuan mensejahterakan rakyatnya.

Simon Sinek menjelaskan, “permainan terbatas atau *finite game*”, memiliki pemain yang jelas, aturan yang kaku, semua pemain di dalamnya menyetujui tujuan bersama, seperti permainan olah raga pada umumnya, semuanya mengejar kemenangan, dan setelah kemenangan itu datang, semuanya bubar. Lalu, permainan berikut dan berikutnya akan datang silih berganti. Mereka hanya pakem dengan permainan pada satu bidangnya saja, seperti apakah pemain sepakbola bisa bermain bisbol? Belum tentu.

Sangat berbeda dengan “permainan tidak terbatas -- *infinite game*”, yang memiliki ragam karakter pemain yang nyata juga abstrak, aturan main selalu berubah, tujuan mereka untuk mempertahankan permainan itu sendiri, para pemain tetap bertahan untuk berada di dalam permainan yang tidak pernah berhenti itu.

Saat “pemain *finite game* (pemain terbatas)” menghadapi “pemain *infinite game* (pemain tidak terbatas)”, maka yang terjadi adalah “pemain terbatas” akan frustrasi dan kalah, karena mereka hanya bertujuan mencari kemenangan. Sedangkan, “pemain tidak terbatas” menjadi pemenang karena bermain stabil, mereka bertahan walaupun dalam skema permainan yang berubah dan tidak pernah berhenti.

Dalam skema peperangan, terjadi saat perang Vietnam, tentara Amerika sebagai “pemain terbatas” kalah dari pasukan Vietnam sebagai “pemain tidak terbatas”. Amerika berjuang untuk mengalahkan Vietnam, sebaliknya prajurit Vietnam berjuang untuk bertahan hidup, hingga pasukan terakhir. Saat pasukan Soviet menghadapi Mujahidin di Timur Tengah, mereka mundur karena Mujahidin sebagai “pemain tidak terbatas” berjuang untuk kehidupan panjang di masa depan, sedangkan pasukan Soviet sebagai “pemain terbatas” berjuang hanya untuk mengalahkan Mujahidin.

Dalam skema pemerintahan, reformasi birokrasi identik dengan suatu “*area never ending* atau *infinite game*”, karena didalamnya dialiri “napas perubahan” yang terus bergulir mengikuti perkembangan peradaban dan zaman, tidak pernah berhenti hingga mencapai titik kesempurnaannya. Sistem ini langgeng, didalamnya akan selalu datang silih berganti generasi yang akan menjalankannya. Buktinya, sejak merdeka, kita sudah menjadi generasi yang kesekian yang menjalankan pemerintahan. Begitu juga di masa depan, akan ada generasi yang menjalankannya. Aparatur negara adalah tulang punggung dalam menjalankan roda pemerintahan, baik di masa kini maupun di masa mendatang.

Maka, untuk menghadapi skema reformasi birokrasi dalam arus perubahan dan dinamika global yang tiada pernah berakhir, aparatur negara harus menjadi “pemain pada area yang tidak dibatasi oleh waktu, harus mencapai kinerja yang maksimal, selalu beradaptasi dengan perubahan aturan dan tidak terikat batasan kemenangan yang ingin diraih”.

*Mindset* aparatur negara harus diubah, mereka bekerja bukan untuk menang, bukan untuk skor, bukan untuk penghargaan, bukan untuk predikat prestasi dalam bentuk angka. “Sejatinya, aparatur negara bekerja untuk berjuang demi kehidupan, untuk peradaban panjang yang lebih baik dan jauh ke depan, untuk masa depan kemanusiaan, kehidupan yang lebih baik untuk anak dan cucu kita”.





**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Ini adalah aparatur sipil negara, yang mampu beradaptasi, menjadi *leader* dan membawa perubahan fundamental untuk organisasinya. Oleh karenanya, pengembangan kapasitas ASN agar dapat menggerakkan reformasi birokrasi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik menjadi tantangan birokrasi bagi Indonesia.

***Hadirin sekalian yang saya hormati,***

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PANRB dalam pengembangan kapasitas ASN adalah dengan berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program master *double degree* peningkatan kapasitas ASN dalam mendukung reformasi birokrasi.

Saya berharap melalui program ini, ASN dapat menjadi motor penggerak yang mendukung pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi sehingga mampu menjawab tantangan birokrasi yang dihadapi. Semoga apa yang kita upayakan dapat bermanfaat dan membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Terima kasih.

***Sekian dan Terima Kasih  
Wassalammualaikum Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**KEYNOTE SPEECH HUT BPPT KE-41  
TENTANG PEMBANGUNAN SDM IPTEK  
DALAM MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2020-2024  
Jakarta, 22 Agustus 2019**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.,  
Salam Sejahtera bagi Kita Sekalian.***

**Yang saya hormati:**

- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
- Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Kepala BPPT
- Para Pejabat serta Hadirin yang Berbahagia;

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada momentum yang berbahagia ini yaitu acara puncak HUT BPPT yang ke-41, dengan tema "Pendayagunaan SDM IPTEK Penghasil Inovasi Teknologi Sebagai Penghela Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju, Mandiri, Adil dan Makmur".

***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Saat ini terdapat beberapa isu strategis dan tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Salah satu isu strategis tersebut adalah mengenai isu global. Indonesia dituntut untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia dan berdaya saing dengan negara-negara lain.

Terlebih lagi dengan adanya perubahan cepat era industri 4.0 yang sarat dengan otomatisasi dan penerapan internet terintegrasi secara menyeluruh. Sehingga banyak pekerjaan yang berpotensi hilang dan peran manusia pun akan terdegradasi. Menanggapi dampak tersebut, Jepang memperkenalkan *society 5.0*, suatu konsep yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Melalui *society 5.0*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) akan mentransformasi *big data* menjadi suatu kearifan baru yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia.

***Bapak dan Ibu yang kami muliakan,***

Menurut hasil survei oleh Deloitte di 70 negara terhadap 1.200 pegawai pemerintah. "*Teknologi digital telah berdampak signifikan bagi perubahan cara dan pola kerja pemerintah, sebanyak 76% dari pimpinan yang disurvei melihat bahwa teknologi digital mendorong terjadinya perubahan*". Ini menandakan kecenderungan pemanfaatan teknologi digital berkembang pesat. Apalagi separuh lebih populasi Indonesia adalah pengguna internet sehingga kunci utama keberhasilan merespon perubahan tentu terletak pada kemampuan ASN dalam birokrasi dalam mengimplementasikan teknologi untuk inovasi - inovasi yang melayani rakyat.



Hal tersebut selaras dengan peta jalan pembangunan ASN yang mengarah pada terwujudnya birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024 melalui penyiapan *generasi SMART ASN* guna mengantisipasi tantangan disrupsi era revolusi industri 4.0 serta menjadikan tantangan dan hambatan sebagai kekuatan dan peluang untuk mendorong Visi Indonesia 2045, dengan berfondasi pada transformasi digitalisasi birokrasi yang lebih memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat, memangkas segala bentuk praktik birokrasi yang berbelit dan lamban, memacu kinerja birokrasi menjadi lebih efisien, fleksibel, dan adaptif, serta meluaskan semangat perubahan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Pertama, indikator kesiapan Indonesia menunjukkan tren positif. Global Competitiveness Index 4.0 tahun 2018, Indonesia peringkat ke 45 dari 140, naik dua tingkat dari tahun 2017. Government Effectiveness Index naik dari tahun 2015 sampai 2017 dengan peringkat 46, 53, dan 55, serta tren kenaikan dalam 2 dekade terakhir (1997-2017), sejak bergulirnya era reformasi.

Kedua, dalam rekrutmen tahun 2018, ditetapkan 238.015 formasi pada 76 K/L dan 525 Pemda. Sebanyak 180.624 CPNS lulus dan mengisi 164.783 formasi umum, 6.307 formasi *cumlaude*, 1.808 disabilitas, 604 putra Papua dan Papua Barat, 23 diaspora, 287 olahragawan berprestasi internasional, serta 6.812 eks tenaga honorer K2.

Ketiga, proporsi ASN. Total PNS berjumlah 4.287.526 orang, proporsi terbesar adalah tenaga administratif sebesar 1,6 juta (39%). Maka, perlu restrukturisasi agar ASN didominasi jabatan fungsional teknis dan berkeahlian profesional yang lebih optimal mendukung pembangunan baik di pusat maupun daerah.

Oleh karena itu, berakhirnya RPJMN III, sebagai transisi dari sistem merit menuju birokrasi berkelas dunia, serta memasuki tahun pembangunan SDM tahun 2020 adalah momentum kuat untuk memacu kecepatan bangsa dalam pembentukan generasi *SMART ASN*, yang profesional, berdaya saing, berintegritas, berjiwa kebangsaan, berwawasan global, berkemampuan bahasa asing, IT dan membangun *networking*, serta *entrepreneurship*. *SMART ASN* juga akan menjadi *digital talent* dan *digital leader* seluruh lini terdepan pelayanan pemerintahan.

### ***Bapak dan Ibu yang kami hormati,***

Melihat urgensi penyiapan ASN tersebut, idealnya pola pikir dan cara pandang keberadaan ASN sebagai pegawai yang digerakkan oleh aturan (*rule-based*), harus diubah ke posisi pegawai yang berorientasi kepada kinerja (*performance-based*). Oleh sebab itu, arah kebijakan pembangunan ASN ke depan perlu dikembangkan berdasarkan prinsip dasar *human capital management* yang bertumpu pada reformasi manajemen ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang dimulai dari perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan, promosi, rotasi, dan karier, serta peningkatan kesejahteraan ASN.

### ***Bapak dan Ibu yang kami hormati,***

Berbeda dengan perencanaan ASN pada masa sebelumnya yang kurang berdasarkan data faktual kebutuhan di lapangan, saat ini perencanaan ASN telah dilakukan agar sesuai dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah, *core business* instansi berdasarkan analisis jabatan



dan analisis beban kerja. Untuk itu, telah dilakukan berbagai perbaikan dan reformasi sistem perencanaan ASN yang terintegrasi.

Selanjutnya, perbaikan dan reformasi sistem rekrutmen ASN dilakukan melalui penggunaan sistem pendaftaran secara *online* dan terintegrasi, serta penggunaan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang dilakukan secara objektif dan transparan terbukti dapat menghilangkan praktik manipulasi dan kecurangan. Sekitar 2,4 juta pelamar berkompetisi untuk mendapatkan 37 ribu formasi jabatan pada tahun 2017 dan 3,6 juta pelamar berpartisipasi untuk mendapatkan 238 ribu formasi jabatan pada tahun 2018.

Selain rekrutmen CPNS, seleksi terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi (JPT utama, madya, dan pratama) dilakukan dengan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dalam proses rekrutmen tersebut dibentuk panitia seleksi independen yang terdiri dari unsur eksternal dan unsur internal untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Dalam hal pengembangan kompetensi ASN terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, telah ditindaklanjuti antara lain:

- Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
- Pengembangan instrumen pengukuran kompetensi JPT melalui *assesment center* dan selain JPT melalui penilaian kompetensi dan kinerja dilakukan oleh masing-masing atasannya serta tim penilai kinerja.
- Penetapan pengembangan kapasitas ASN minimal 20 jam per tahun bagi setiap PNS untuk mengisi kesenjangan (*gap*) kompetensi pegawai.

Transformasi diklat konvensional melalui pendekatan metode pembelajaran yang baru dan berkelanjutan serta melibatkan seluruh pejabat struktural melalui *ASN Corporate University* dengan cara *coaching*, *mentoring*, *on the job training*, dan sebagainya. Adapun porsi pembelajaran terdiri dari 10% pembelajaran mandiri dan di kelas, 20% *coaching* dan *mentoring*, serta 70% pembelajaran di unit kerja.

***Bapak dan Ibu sekalian,***

Terkait masalah utama dalam manajemen kinerja, yakni belum terkaitnya kinerja dengan sistem karier dan remunerasi, serta penilaian kinerja yang belum objektif. Untuk mengatasi hal tersebut, sedang dikembangkan pembayaran tunjangan berbasis kinerja dengan gaji yang kompetitif untuk memenuhi *internal equity* dan tetap dalam batasan anggaran belanja pegawai.

Penilaian kinerja didahului dengan dialog kinerja antara pegawai dengan atasannya untuk lebih memotivasi pegawai dalam mencapai kinerja yang tinggi. Selanjutnya, penilaian kinerja menerapkan metode 360° sehingga melibatkan unsur penilaian atasan, rekan kerja, dan bawahan supaya lebih obyektif sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

***Bapak dan Ibu yang berbahagia,***

Upaya penerapan sistem merit telah dilakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Sistem



merit ini menjadi landasan dalam manajemen karier yang mempertimbangkan pola karier hanya didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.

Indonesia menempati peringkat ke-67 dari 125 negara dalam Global Talent Competitiveness Index 2019. Untuk perbaikan indeks ini, struktur ideal ASN perlu didukung manajemen talenta nasional yang dikembangkan untuk menempatkan talenta terbaik pada jabatan strategis. Manajemen talenta institusional dari seluruh instansi diintegrasikan guna membentuk *talent pool* nasional, lalu diselaraskan dengan manajemen talenta korporasi sehingga memungkinkan mobilisasi talenta lintas sektor, baik publik maupun privat, yang fokus dan prioritas mengungkit pembangunan pusat maupun daerah.

Untuk regenerasi level kepemimpinan, sedang disiapkan sistem promosi dan rotasi nasional, lintas sektoral, khususnya jabatan pimpinan tinggi, serta penyetaraan pada penghasilan dan fasilitas yang adil dan proporsional sehingga juga menjadi agen perekat nasional.

***Bapak dan Ibu yang kami muliakan,***

Peningkatan kesejahteraan ASN pun dilakukan agar ASN lebih optimal dalam berkinerja membangun bangsa sebagai salah satu program prioritas reformasi birokrasi. Saat ini sedang dilakukan perubahan dalam sistem gaji, tunjangan, dan fasilitas, serta mengembangkan kebijakan manajemen kesejahteraan ASN (*wealth management*) secara menyeluruh.

Selain itu, terus dilakukan perbaikan sistem pensiun dengan iuran bersama, rasio manfaat yang layak, dan didanai secara penuh (*fully funded*) oleh lembaga pengelola pensiun, serta perbaikan jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya.

Kedua hal tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas, serta peraturan pemerintah tentang pensiun dan jaminan hari tua.

***Bapak dan Ibu yang saya hormati,***

Semua itu merupakan upaya perbaikan manajemen ASN yang telah dan sedang dilakukan secara konsisten agar pada tahun 2024 Indonesia bisa menjadi salah satu negara maju yang didukung oleh SDM aparatur yang unggul dan berkualitas.

Secara khusus, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-41 kepada BPPT. Semoga BPPT semakin berjaya dan kita semua dapat senantiasa berjuang bersama dalam membangun kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemajuan bangsa, serta mewujudkan pemerintahan berkelas dunia.

***Sekian dan Terima Kasih  
Wassalamualaikum Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**





**SAMBUTAN PERESMIAN MPP BOGOR**  
**Bogor, 26 Agustus 2019**

***Assalamualaikum Wr. Wb.,  
Salam Sejahtera bagi Kita Semua.***

**Yang saya hormati:**

- Wali Kota, Wakil Wali Kota, Seluruh Pejabat serta Unsur Forkopimda di Kota Madya Bogor;
- Perwakilan dari Polri;
- Hadirin dan para Tamu Undangan yang Berbahagia.

Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga dapat menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Bogor, mal pelayanan publik ke-16 di Indonesia, dan yang pertama di Provinsi Jawa Barat.

***Hadirin yang saya hormati,***

Kementerian PANRB menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sejak tahun 2014, yang hingga tahun 2019 telah dilahirkan 13.214 inovasi, guna memperkuat basis dan akses pelayanan kepada masyarakat (baik di pusat maupun daerah). Secara kualitatif, tren inovasi meningkat dari tahun ke tahun, hingga puncaknya tahun 2019 sebanyak 330 K/L/Pemda melahirkan 3.156 inovasi baru. Hal ini menandakan bahwa inovasi sudah menjadi nilai dan budaya baru di dalam tata kelola pemerintahan. Ribuan inovasi tersebut diseleksi menjadi Top 99, lalu Top 45, kemudian “dipilih yang terbaik” untuk mengikuti kompetisi tingkat internasional. Melalui metode ini, dua inovasi pelayanan publik Indonesia, meraih penghargaan tertinggi di ajang *United Nations Public Service Awards* (UNPSA), yakni Sistem EDAT Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2018 serta Peta Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2019.

Selanjutnya, Mal Pelayanan Publik merupakan komitmen nyata peningkatan kualitas pelayanan publik, yang berbasis inovasi dan kreativitas untuk mendukung (*Ease of Doing Business*) di Indonesia, memangkas pelayanan perizinan lintas *stakeholder* yang selama ini sulit, berbelit, dan ego sektoral, diubah menjadi kolaboratif, sinergis, dan terintegrasi. Di gedung Mal Pelayanan Publik Kota Bogor, total 145 jenis layanan dari 16 instansi pelayanan pusat, daerah, serta BUMN/BUMD digabung dalam satu atap, satu pintu, satu akses yang memudahkan masyarakat. Selanjutnya, sebanyak 36 kabupaten/kota telah menandatangani komitmen pembentukan mal pelayanan publik, yang secara bertahap akan diimplementasikan di tahun 2019 dan 2020. Ini adalah komitmen Pemda dalam mendukung program prioritas untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang makin baik, serta Visi Indonesia Maju.



***Hadirin yang saya hormati,***

Kami mengapresiasi Pemkot Bogor atas banyak capaian prestasi di bidang pelayanan publik. Sistem pelayanan Mal Pelayanan Publik dimodernisasi melalui aplikasi *digital* MPP Kota Bogor yang dapat diunduh melalui aplikasi *playstore*. Tahun 2018, dua inovasi Pemkot Bogor masuk Top 99 inovasi pelayanan publik, yakni “Anjas Go Clear” aplikasi jabatan struktural Pemkot Bogor, serta “SMART” aplikasi perizinan yang sederhana, mudah, akuntabel, ramah, tepat waktu. Tahun 2019, satu inovasi Pemkot Bogor masuk Top 99 inovasi pelayanan publik, yakni “Sekolah Ibu” peningkatan ketahanan keluarga melalui pendidikan non formal bagi para ibu.

Demikian yang kami sampaikan. Semoga MPP Kota Bogor dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

***Sekian dan Terima Kasih  
Wassalamualaikum Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**TALKING POINTERS  
TALKSHOW INDONESIA MAJU-ARSADA  
Jakarta, 27 Agustus 2019**

**Yang saya hormati:**

- Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; serta Menteri Kesehatan;
  - Para Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Kesehatan;
  - Para Pejabat Pemda, Pengurus Pusat Arsada, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, Pengurus Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM, serta Hadirin yang Berbahagia.
- 
1. Saya selaku Menteri PANRB mendukung penuh Visi Indonesia Maju, yang dijabarkan melalui lima program kerja prioritas: 1) Infrastruktur, 2) SDM, 3) Investasi, 4) Reformasi Birokrasi, 5) APBN yang Tepat Sasaran.
  2. Inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia, penting untuk mengokohkan daya saing Indonesia yang hidup dalam “ekosistem persaingan global”, seperti:
    - a. Risiko ketidakpastian ekonomi yang terdampak oleh kebijakan ekonomi Amerika, perang dagang Amerika-Tiongkok, serta guncangan benua Eropa dan geopolitik global.
    - b. Pada Juli 2019, IMF dan WEO merevisi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019-2020 menjadi 3,2% dan 3,5% (lebih rendah 0,1% dari pada proyeksi sebelumnya).
    - c. Riset World Economic Forum, tahun 2050 sebanyak 150 juta penduduk dunia kehilangan pekerjaan, 450 juta penduduk dunia bekerja di bidang baru. Untuk itu, harus diciptakan 300 juta lapangan kerja selama 30 tahun untuk menutup *gap* itu.
    - d. Riset MC Kinsey, sebanyak 50% pekerjaan terdisrupsi oleh otomatisasi, 65% pelajar akan bekerja di posisi yang tidak ada sekarang.
  3. Penguatan SDM juga penting mendorong tercapainya proyeksi kondisi nasional Indonesia: Proyeksi pertumbuhan Indonesia: IMF → 5,2% (2019) dan 5,2% (2020); World Bank → 5,1% (2019) dan 5,2% (2020); ADB → 5,2% (2019) dan 5,3% (2020); Concensus Forecast → 5,1% (2019) dan 5,1% (2020).
  4. Bahan renungan: semua negara dunia memposisikan SDM sebagai aset yang terbarukan, kekayaan utama bangsa, potensi, dan peluang terbesar untuk maju.
    - a. Dari sebanyak 42% populasi dunia, 3 miliar dibawah 25 tahun berpotensi untuk pelibatan terbesar generasi muda dalam pemerintahan.
    - b. Presiden World Bank: penting bagi suatu negara untuk meningkatkan SDM (gabungan skill dan pengetahuan) guna mempersiapkan pasar tenaga kerja di masa depan.
    - c. Pendiri Google+ (Max Ventila): Apakah model pendidikan kini, sudah cukup beradaptasi menyamai kecepatan perubahan teknologi? Guru, pengguna teknologi, pembuat kebijakan harus memacu pendidikan terbaik beradaptasi dengan teknologi.
    - d. Catatan UNESCO, sebanyak 263 juta anak, remaja, dan generasi muda, masih belum belajar di sekolah dan tidak punya akses ke pendidikan.



- e. Catatan World Bank (2018) tentang anak *stunting*, sebanyak 155 juta anak dibawah 5 tahun, pertumbuhannya lebih pendek daripada yang terlihat seharusnya. *Problem* terbesar adalah perkembangan otak anak, artinya tidak bisa belajar optimal, dampaknya tidak bisa optimal saat bekerja.
- 5. Maka, dua fokus pada pengembangan SDM Indonesia:
  - a. Pendidikan: perluasan akses pendidikan di dalam maupun luar negeri, peningkatan skill, kapasitas *enterpreneurship*, penguasaan ICT, *research and development*.
  - b. Kesehatan: pengurangan *stunting*, penguatan preventif, program jaminan kesehatan nasional.Dua faktor itu, digabungkan dengan kecepatan teknologi dapat menghasilkan SDM yang unggul.
- 6. Government Effectiveness Index (GEI) → Indonesia naik 19 peringkat dari 103 (2015) menjadi 84 (2017). e-Government Development Index Indonesia naik 9 peringkat dari 116 (2016) menjadi 107 (2018).
- 7. Dalam bidang inovasi pelayanan publik:
  - a. Reformasi birokrasi ditandai melalui transparansi dan peningkatan kualitas, kemudahan, dan efisiensi pelayanan publik (melalui 16 Mal Pelayanan Publik dan komitmen 36 Pemda untuk mendirikan MPP tahun 2019 dan 2020).
  - b. Kementerian PANRB merangsang 14 ribu inovasi lahir dari tahun 2014 s.d. 2018, dan banyak diantaranya di bidang kesehatan (Top 99 → Top 45 → UNPSA).
  - c. Program promotif and preventif, inovasi pelayanan publik Sistem EDAT dari Kab. Teluk Bintuni menjadi juara 1 UNPSA tahun 2018. Skala manfaatnya diluaskan tingkat nasional (oleh Kemenkes) untuk mencegah epidemi wabah malaria di Indonesia.
  - d. Tahun 2015, Kabupaten Aceh Singkil dengan inovasi “Kerja Sama Dukun Beranak dengan Bidan pada Saat Melahirkan” untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan anak meraih juara 2 UNPSA.
  - e. Mengawal peningkatan fokus dan prioritas Kementerian Kesehatan (sasaran strategis dan IKU yang melampaui kategori cukup atau skor 48) dengan merekomendasikan dari 10 sasaran strategis dan 33 indikator kinerja menjadi tiga sasaran strategis dan sepuluh indikator kinerja.
- 8. Kebijakan Kementerian PANRB bidang SDM:
  - a. Pembangunan SDM melalui rekrutmen ASN yang berkualitas dan profesional (CPNS dan PPPK):
    - 1) Pengisian jabatan teknis berkeahlian spesifik untuk menguatkan konektivitas infrastruktur, sesuai kebutuhan industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan tambak perikanan.
    - 2) Prioritas formasi yang mendukung pelayanan dasar pemerintah (kesehatan dan pendidikan).
    - 3) Menjaring tenaga guru dan dosen berkualitas, serta membangun sistem pendidikan yang dapat menyalurkan langsung lulusannya masuk ke lapangan kerja di masa depan.



- 4) Reformasi birokrasi diarahkan pada kebijakan perampingan organisasi, penguatan jabatan fungsional, perubahan *mindset* birokrat agar adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif.
- 5) Membangun Manajemen Talenta Nasional, yakni talenta terbaik ditempatkan sesuai dengan kebutuhan instansi dan keahliannya. *Source* talenta institusional dan talenta korporasi diintegrasikan dan dimobilisasi secara lintas sektor (baik sektor publik maupun privat).
- 6) Membuka investasi dan percepatan perizinan melalui simplifikasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik terintegrasi.
- 7) Membangun akuntabilitas penggunaan APBN melalui perluasan SAKIP, sehingga fokus dan tepat pada sasaran prioritas pembangunan memberi manfaat ekonomi dan sosial.
- b. Restrukturisasi proporsi ASN dari yang dominan 1,6 juta jabatan administrasi umum (total 4.287.526) “harus diproyeksikan dan terakselerasi” pada pemenuhan tenaga di bidang pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, teknis berkeahlian spesifik) yang mendukung pembangunan nasional dan daerah, serta daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Prinsip rekrutmen ASN minimal *zero growth*, tidak merekrut tenaga administrasi umum, hingga proporsi dan persebaran ASN nasional berimbang/*equitable* untuk pembangunan.
- c. Pengembangan kapasitas ASN melalui program pendidikan S2 (*double degree*), transformasi diklat konvensional ke *Corporate University* guna mengatasi *e-government* yang mengotomatisasi sektor publik dan dinamika kompleksitas pemerintahan.
- d. Sistem merit promosi, mutasi, dan rotasi yang mengacu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta kebutuhan. Penilaian kinerja dan penghargaan dengan metode 360°.
- e. Peningkatan kesejahteraan melalui reformasi sistem gaji, tunjangan, dan fasilitas, sistem jaminan pensiun dan hari tua.
9. Kebijakan Kementerian PANRB bidang Kelembagaan:
  - a. Cepat merespon kebutuhan masyarakat melalui SPBE (*e-Procurement*, Satu Data, Satu Peta).
  - b. Kementerian PANRB, Kemendagri, dan Kemenkes menguatkan kelembagaan Rumah Sakit Daerah (RSD), melalui penataan organisasi sebagaimana usulan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada).
  - c. Permasalahan mendasar RSD: 1) Kemandirian dan fleksibilitas pengelolaan keuangan, 2) Kepegawaian dan 3) Barang Milik Daerah (BMD).
  - d. RSD belum otonom mengelola rumah sakit walau sudah menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSD (sebagai unit pelaksana teknis) masih terbatas mengelola anggaran, karena harus pengusulan ke Dinas Kesehatan.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga belum bisa menopang tata kelola keuangan, BMD dan kepegawaian RSD yang otonom, sehingga dampaknya adalah mutu layanan kesehatan menurun.
  - f. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk menjalankan otonomi Direktur RSD bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, BMD, dan kepegawaian. Oleh





**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

karenanya, penguatan kelembagaan RSD dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 perlu ditambahkan pengaturan materi, sebagai berikut:

- 1) Pengaturan otonomi dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Direktur RSD ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang, termasuk menyusun rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran.
- 2) Pengaturan otonomi dan fleksibilitas dalam pengelolaan manajemen SDM. Direktur RSD provinsi dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian ASN kepada pejabat berwenang, dapat membina ASN dalam tugas dan fungsi jabatannya, serta dapat mengelola ASN di lingkungan RSD.
- 3) Untuk aspek organisasi, Direktur RSD adalah jabatan fungsional dokter (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah). Kementerian PANRB setuju jabatan Direktur RSD menjadi jabatan struktural yang jenjangnya disesuaikan kelas RSD (revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016).

***Sekian dan Terima Kasih  
Wassalamualaikum Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**SAMBUTAN**  
**LAUNCHING SISTEM INFORMASI KRISNA 3.0**  
**Jakarta, 29 Agustus 2019**

***Assalammua'alaikum Wr. Wb.,  
Salam Sejahtera untuk Kita Sekalian,***

**Yang saya hormati:**

- Menteri Keuangan;
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri PPN / Kepala Bappenas; serta
- Seluruh Hadirin yang Berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkenan-Nya kita dapat menghadiri “*Launching* Sistem Informasi Krisna 3.0”. Momentum ini akan menjadi salah satu daya ungkit dalam mendorong Indonesia agar lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibel dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh risiko.

***Hadirin yang Saya Hormati,***

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi Indonesia tahun 2019-2024, yaitu; 1) Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, 2) Pembangunan SDM, 3) Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, 4) Reformasi birokrasi, dan 5) APBN yang fokus dan tepat sasaran. Dalam mempercepat pencapaian visi tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya yang dilakukan secara cepat, terstruktur, dan masif.

Beberapa hal yang telah kita lakukan sebagai upaya menindaklanjuti Visi Indonesia 2019-2014, yaitu :

1. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada restrukturisasi kelembagaan instansi pemerintah agar menjadi lebih gesit, lincah, dan ramping. Restrukturisasi metode kerja, proses bisnis, dan SOP sehingga layanan menjadi lebih cepat, murah, dan tidak berbelit belit. Perubahan pola pikir ASN menjadi lebih kompetitif, inovatif, dan produktif.
2. Penyempurnaan Aplikasi Krisna 3.0. yang akan kita *launching* hari ini merupakan upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia, yaitu APBN yang fokus dan tepat sasaran. APBN yang dikeluarkan harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

***Hadirin yang Berbahagia,***

Kita telah berhasil mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja melalui Aplikasi Krisna, yang merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PANRB. Melalui Aplikasi Krisna, perencanaan,



penganggaran, dan manajemen kinerja akan lebih berkualitas. Setiap rupiah anggaran yang direncanakan oleh instansi pemerintah akan dikunci supaya memiliki hasil yang jelas dan sesuai dengan mandatnya masing-masing.

Aplikasi Krisna 3.0 akan mempermudah perencana untuk memastikan prioritas-prioritas pembangunan terkawal dengan baik dalam rencana kerja K/L. Namun demikian, pembenahan melalui sistem informasi saja tidak cukup. *Mindset* dari perencana kita juga perlu dibenahi. Perlu ditanamkan *mindset* bahwa program dan kegiatan dirancang bertujuan untuk mencapai target kinerja yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dokumen perencanaan bukanlah sekedar kompilasi usulan kegiatan ataupun *copy and paste* dari tahun lalu. Dengan berjalannya Krisna diharapkan dapat mencegah terjadinya program kegiatan yang tidak relevan, sehingga mendorong tercapainya sasaran pembangunan nasional.

***Hadirin sekalian yang saya hormati,***

Secara nasional, pelaksanaan Krisna merupakan langkah besar dalam proses perencanaan dan penganggaran kita. Pelaksanaan Krisna dapat mencegah terjadinya program kegiatan yang tidak relevan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Namun apabila dibandingkan dengan pelaksanaan pada pemerintah daerah, pengintegrasian pada level nasional agak sedikit terlambat. Beberapa daerah yang sudah melaksanakan pengintegrasian perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja adalah:

**1. Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta**

- a. Pemprov DIY telah melakukan pengintegrasian sistem perencanaan (aplikasi *e-Planning*), sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan (aplikasi SIPKD atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), sistem *monitoring* pelaksanaan kinerja (aplikasi e-Monev) dan sistem pengelolaan data kinerja (Aplikasi Jogja Dataku). Pengintegrasian sistem ini memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program merupakan cara untuk mencapai sasaran pembangunan daerah, termasuk penetapan target kinerja secara rasional dan *challenging*.
- b. Dengan pelaksanaan pengintegrasian tersebut Pemprov DIY dapat melakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,6 triliun rupiah pada tahun 2017 dan 236 miliar rupiah pada tahun 2018.

**2. Pemkab Banyuwangi**

- a. Pemkab Banyuwangi telah berupaya melakukan pengintegrasian sistem perencanaan, sistem penganggaran dan informasi kinerja, bahkan mampu mengintegrasikan pelaksanaan kinerja dan keuangan pada level desa. Integrasi ini mampu memastikan keterhubungan antara kegiatan pada level desa sampai pada kegiatan dan program pada level pemerintah daerah.
- b. Pelaksanaan pengintegrasian ini mampu melakukan efisiensi sebesar 331 miliar rupiah pada tahun 2018.
- c. Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, pada level pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi sebesar 65,14 triliun rupiah pada tahun 2018 dan 35,68 triliun rupiah pada tahun 2017.



***Hadirin yang berbahagia,***

Hari ini adalah salah satu wujud langkah kita untuk mengefisienkan birokrasi dan mampu menyejahterakan masyarakat sebagaimana tujuan bernegara yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Saya mengajak kepada seluruh ASN agar bisa bersinergi dan berkolaborasi, hilangkan ego sektoral kotak-kotak kelembagaan, karena yang kita lakukan hanya satu untuk Indonesia Raya. Pelaksanaan integrasi ini adalah salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi kita untuk kemajuan Indonesia. Ke depan saya harapkan, kita terus melakukan sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah pada segala bidang pemerintahan sehingga mempercepat pencapaian Indonesia maju.

Sekali lagi saya mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran agar kita dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat demi Indonesia maju dan sejahtera.

***Sekian dan Terima Kasih  
Wassalammualaikum Wr. Wb.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**